

**GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2009 DI KOTA PADANG**

TESIS



Oleh

**SITI AISYAH
NIM 1104162**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
Mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**KONSENTRASI PENDIDIKAN SEJARAH
PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

ABSTRACT

“Abstaining voters at President General election 2009 in Padang City”
arranged by **SITI AISYAH. NIM. 1104162.** Social science Course Program,
History Section. State University of Padang.

This research aimed to: Describe the process of being Abstentions voters in the city of Padang on the 2009 Presidential election and identify the causes of the high Abstentions and explained that due to the high percentage of Abstentions in the city of Padang on the 2009 Presidential Election for democracy.

The method use in this research his history. The research data is in the form of document which obtains from General Election Commission (KPU) of West Sumatera which containing Abstain data of 2009 Presidential General Election in Padang City and interview of the abstainers, political activist, political observer, the chairman of RT and RW (smaller unit of local government), the member of Padang City KPU and Presidential General Election Field Team. Information also collected from secunder resources, such as journal, newspaper, and research resultrelated with Abstain phenomenon.

The research finding is: The findings of this study are: a voter process Abstentions in the city of Padang on the 2009 Presidential Election. Election of the President and Vice President directly first held in the 2004 elections. Previously, the Presidential election held by the People's Consultative Assembly (MPR). 2004 Presidential Election was held two rounds. In the first round of most informants to vote on Election 2004 and the second round there are Part of informants who did so for reasons such as busy work, no place, and there is an element of saturation of informants since before the 2004 presidential and legislative elections were also held informants also argued not to vote because the party did not go in the second round. In the 2009 Presidential election forms Abstentions in Padang Abstentions are technical, political and technical political Abstentions, Abstentions the most is political Abstentions. In the 2014 Presidential Election informant did so mostly because of elections according to informants only used as a tool to achieve power alone regardless of the fate of the country and campaign promises are not kept. Factors causing the high Abstentions in the city of Padang on the 2009 Presidential Election is a factor of political, technical, social and economic. Due to the high Abstentions in the city of Padang on the democratic legitimacy of the 2009 election will be reduced by the inability of the political parties and the government to show the performance, then the phenomenon Abstentions will crystallize into democratic internal factors that potentially cause spoilage or decay of political democracy (political decay), so it will have implications crippling democracy, where political parties as a generator engine in a democratic political participation morally take responsibility.

ABSTRAK

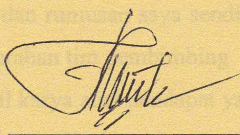
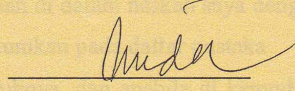
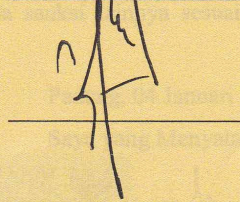
“Golongan Putih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2009 di Kota Padang” di susun oleh **SITI AISYAH. NIM 1104162.** Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Jurusan Sejarah. Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP).

Penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan proses pemilih menjadi Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009, mengidentifikasi faktor penyebab tingginya Golput dan menjelaskan akibat tingginya persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 bagi demokrasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, data dalam penelitian ini berupa dokumen yang diperoleh dari KPU Kota Padang dan KPU Sumatera Barat tentang data Golput pada Pilpres 2009 di Kota Padang, serta wawancara dengan orang-orang yang Golput, aktivis partai politik, pengamat politik, ketua RT, RW, anggota KPU Kota Padang dan kelompok pelaksana pemungutan suara. Informasi juga dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti buku-buku, jurnal, koran dan hasil penelitian yang berkaitan dengan fenomena Golput.

Temuan penelitian ini adalah: Proses pemilih menjadi Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung pertama kali diadakan pada Pemilu 2004. Sebelumnya, pemilihan Presiden diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pilpres 2004 diadakan dua kali putaran. Pada putaran pertama kebanyakan informan ikut memilih pada Pilpres 2004 dan pada putaran kedua ada sebagian informan yang tidak ikut memilih dengan alasan karena kesibukan seperti bekerja, tidak ditempat, dan adanya unsur kejenuhan dari informan karena sebelum Pilpres 2004 juga diadakan Pemilu legislatif dan informan juga beralasan tidak ikut memilih karena partainya tidak masuk pada putaran kedua. Pada Pilpres 2009 bentuk-bentuk Golput di Kota Padang yaitu Golput teknis, teknis politis dan Golput politis, Golput yang paling banyak adalah Golput politis. Pada Pilpres 2014 nanti kebanyakan informan tidak ikut memilih karena Pemilu menurut informan hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan semata tanpa memperdulikan nasib negaranya dan janji-janji kampanye tidak ditepati. Faktor penyebab tingginya Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 adalah faktor politis, teknis, dan sosial ekonomi. Akibat tingginya Golput bagi demokrasi legitimasi akan berkurang ketidakmampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja, maka fenomena Golput akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*political decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggungjawab.

**Persetujuan Komisi
Ujian Tesis Magister Kependidikan**

No	N a m a	Tanda Tangan
1.	<u>Prof. Dr. Mestika Zed, M.A.</u> (Ketua)	
2.	<u>Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.</u> (Sekretaris)	
3.	<u>Dr. Lindayanti</u> (Anggota)	
4.	<u>Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D.</u> (Anggota)	
5.	<u>Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd.</u> (Anggota)	

Mahasiswa :

Nama : Siti Aisyah

NIM : 1104162

Tanggal Ujian : 8 - 5 - 2013

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Golongan Putih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2009 di Kota Padang”**. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah meninggalkan dua tuntunan hidup untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat yakni al-Qur'an dan Sunnah.

Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Megister Pendidikan (M. Pd) pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial konsentrasi pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.

Penulisan tesis ini banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mestika Zed, MA, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Siti Fatimah, M. Pd, M. Hum, sebagai dosen pembimbing II. Kedua pembimbing ini telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Afriva Khaidir, MAPA., Ph. D, Ibu Dr. Lindayanti, M. Hum dan bapak Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, selaku kontributor yang telah memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran melalui saran dan kritikan agar tesis ini dapat lebih baik

3. Prof. Dr. Mukhaiyar, M. Pd, selaku direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, Prof. Dr. Gusril, M. Pd, selaku asisten I dan Prof. Dr. Rusdinal selaku asisten II serta segenap dosen dan staf pegawai Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Ketua dan anggota KPU Kota Padang dan KPU Sumatera Barat, yang telah memberikan data-data kepada penulis dan kelompok pelaksana pemungutan suara dan seluruh informan yang ada dalam penelitian ini.

Teristimewa buat Ayahanda Syahril dan Ibunda Suwarni tercinta yang telah bersusah payah mengasuh, membesarkan, membimbing dan mendidik dengan penuh cinta kasih dan kesabaran. Buat Kakanda (Syahlan, Sulaiman, M. Yusuf dan adinda tercinta Siti Fatimah).

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berperan dalam memberikan bantuan materil maupun moril dalam penyelesaian tesis ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam penyelesaian tesis ini menjadi amal shaleh di sisi Allah swt, Amin. Penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Padang, 18 Maret 2013
Penulis

SITI AISYAH
NIM. 1104162

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	10
1. Demokrasi	10
2. Partisipasi Politik	14
3. Pemilihan Umum (Pemilu)	20
4. Golongan Putih (Golput).....	23
B. Studi Relevan	35
C. Kerangka Pemikiran.....	37

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Informan Penelitian.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data (<i>Heuristik</i>)	40
D. Kritik Sumber.....	41
E. Interpretasi.....	42
F. Historiografi	42

BAB IV. TEMUAN UMUM

A. Letak Geografis Kota Padang.....	43
B. Jumlah Penduduk Kota Padang.....	44
C. Kehidupan Sosial Ekonomi.....	47
D. Sejarah Pemilu di Indonesia.....	49
E. Partisipasi Politik Sumatera Barat dalam Pemilu.....	58
F. Proses Sejarah Golput di Indonesia.....	61

BAB V. TEMUAN KHUSUS

A. Proses Pemilihan Menjadi Golput	67
B. Faktor Penyebab Tingginya Golput	87
C. Akibat Tingginya Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 bagi Demokrasi	90

BAB VI. PEMBAHASAN

A. Proses Pemilihan Menjadi Golput	95
B. Faktor Penyebab Tingginya Golput	104
C. Akibat Tingginya Persentase Golput	113

BAB VII. PENUTUP

A. Simpulan	115
B. Implikasi.....	116
C. Saran.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk Kota Padang menurut kecamatan	45
Tabel 2. Jumlah pemeluk agama di Kota Padang menurut kecamatan.....	46
Tabel3. Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas bekerja menurut lapangan usaha	47
Tabel 4. Persentase Golput dalam Pemilu di Indonesia.....	61
Tabel 5. Rekapitulasi pemilih terdaftar menggunakan hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Presiden 2009 di Kota Padang	68
Tabel 6. Profil Golput di Kecamatan Padang Barat.....	71
Tabel 7. Profil Golput Golput Teknis	71
Tabel 8. Profil Golput Teknis Politis	72
Tabel 9. Profil Golput Politis	73
Tabel 10. Profil Golput di Kecamatan Koto Tengah	77
Tabel 11. Profil Golput teknis	78
Tabel 12. Profil Golput teknis	80
Tabel 13. Profil Golput politis	80
Tabel14. Profil Golput di Kecamatan BungusTeluk Kabung	84
Tabel 15. Profil Golput Teknis.....	84
Tabel 16. Profil Golput Teknis politis.....	85
Tabel 17. Profil Golput politis.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Penelitian.....	124
Gambar 2. Pemuktahiran Data Pemilih.....	125
Gambar 3. Bimtek PPK Oleh KPU Kota Padang.....	125
Gambar 4. Sosialisasi pada Pemilih Pemula.....	126
Gambar 5. PPS Berok Nipah Memberikan Sosialisai Pencentangan	127
Gambar 6. Pokja Menyebarkan Bahan Sosialisasi	128
Gambar 7. Baju Sosialisasi KPU Kota Padang.....	128
Gambar 8. Pagelaran Seni Tradisional	134
Gambar 9. Pengumutan Suara di TPS.....	141
Gambar 10. Kampanye.....	147
Gambar 11. Pemungutan Suara di TPS.....	148
Gambar 12. Evaluasi Pemilu Tahun 2009.....	152

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan.....	156
Lampiran 2. Instrumen Wawancara.....	164
Lampiran 3. Surat dari Kesbangpol.....	166
Lampiran 4. Surat Balasan dari KPU	167
Lampiran 5. Surat Balasan dari Kecamatan Padang Barat	168
Lampiran 6. Surat Balasan dari Kecamatan Koto Tengah	169
Lampiran 7. Surat Balasan dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung.....	170
Lampiran 8. Grafik Rekapitulasi	171
Lampiran 9. Perbandingan Data	172
Lampiran 10. Perbaikan Rekapitulasi.....	173
Lampiran 11. Resume Perolehan Suara	174
Lampiran 12. Rincian Perolehan Suara.....	175
Lampiran 13. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	176
Lampiran 14. Sertifikat Rekapitulasi	177
Lampiran 15. Jadwal dan Lokasi Kampanye.....	179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Parameter paling valid dalam melihat ada atau tidaknya pembangunan politik disebuah negara adalah demokrasi. Dengan demokrasi berarti pemerintah memperlakukan rakyat sebagai subjek bukan objek pembangunan, sehingga pemerintah merasa perlu membuka kran partisipasi dari masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi dalam masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi dalam pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya terhadap kebijakan pemerintah.¹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara merilis hasil perhitungan pemilihan Gubernur yang digelar pada 7 Maret 2013. Hasil tersebut masih menyisakan satu persoalan baru. Karena diketahui, angka golongan putih (Golput) atau yang tidak memilih, mencapai hampir 60 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar.² Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, pasal 19 ayat 1 menyatakan pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih

¹ Nora Eka Putri. 2011. "Segmentasi Politik Pemilih Pasangan Pemenang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008". *Jurnal Tingkap*, VII (1):31

² *Jawa Pos Nasional Networ*. 2013, 26 Maret. Angka Golput Tinggi Parpol Semakin Rugi

atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.³ Pemilihan umum merupakan barometer demokrasi.⁴

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum menjadi satu indikator pembacaan publik terhadap sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu. Partisipasi yang dimaksud tentu partisipasi yang didasari atas kesadaran dan rasa tanggung jawab individu sebagai warga negara terhadap proses politik yang sedang berlangsung, bukan karena adanya mobilisasi oleh para kandidat. Partisipasi pemilih pada Pemilu di Indonesia terdapat kecenderungan menurun dari Pemilu ke Pemilu. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pada Pemilu 1999, di tengah-tengah euphoria reformasi, partisipasi Pemilu mencapai angka yang cukup fantastis 93 persen, lima tahun berikutnya yakni pada Pemilu 2004 turun menjadi 84 persen dan pada Pemilu 2009 lalu hanya tinggal 71 persen.⁵ Kecendrungan partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh budaya politiknya.

Budaya politik adalah pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang orientasinya berkisar tentang kehidupan politik yang berjalan, dipikir, dikerjakan, dan dihayati oleh para anggota masyarakat setiap harinya serta dicampurbaurkan dengan prestasi di bidang peradaban. Budaya politik partisipan sebenarnya dapat dikaji dari ranah Minangkabau. Orang Minangkabau terkenal ulet

³Undang-undang Negara Republik Indonesia No.10. 2008. tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁴ *Media Indonesia*. 2012, 2012. Verifikasi Parpol, hal.1

⁵ Gebriel Daulai, *Padang Ekspres*. 2013, 12 Maret. Mengerem Penurunan Partisipasi Pemilih, hal. 13

bersilat lidah dan tidak mau mengalah karena di dalam berpetatah-petitih, mereka sudah sejak dulu mempunyai pandangan tentang filsafat hidup.⁶

Konsep kepemimpinan Minangkabau yang bersifat konsultatif, dikenal dengan istilah “musyawarah dan mufakat” itu berfungsi menjaga keseimbangan tertib masyarakat di saat stabil atau di zaman “normal”. Namun sistem semacam itu bukan dirancang untuk kondisi khas yang serba keras yang sangat labil seperti dalam zaman revolusi. Untuk situasi semacam ini, tampaknya lebih diperlukan seorang tokoh kuat dalam arti diterima oleh semua pihak atau setidaknya oleh sebagian besar masyarakat, di samping memiliki wawasan yang luas tentang dinamika politik daerah sezaman bagi mencegah timbulnya perbenturan-perbenturan keras.⁷

Orang Minangkabau tepat untuk dijadikan anggota legislatif, keberadaan demokrasi dan perdebatan berceles dari nuansa budaya Minangkabau ini, membuat orang Minangkabau mengkritisi pemerintah negara.⁸ Pada masyarakat Minangkabau, pemimpin bisa diungkapkan dengan pepatah didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Artinya seseorang pemimpin adalah orang yang dihargai dan dihormati karena dianggap memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, diantaranya adalah kecerdasan. Baik intelektual, emosional, maupun spiritual.⁹

⁶ Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 135.

⁷ Mestika Zed, dkk. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 19-21.

⁸ Inu Kencana Syafii, *Etika Politik* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), hal. 22-23.

⁹ Lismomon Nata, *Padang Ekspers*. 2012, 15 Oktober. Jangan Menjadi Pemimpin Iklan, hal. 3

Kota Padang sejak zaman dahulu dikenal sebagai barometer politik Sumatera Barat. Jika ditinjau dari tingkat partisipasi memilih (*voting turn-out*) pada masa Orde Baru terlihat partisipasi masyarakat cukup tinggi yaitu berkisar antara 80-90%. Tetapi pada Pemilu legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi tersebut merosot, hanya 74,41% dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada putaran pertama sebesar 72,23% dan putaran kedua partisipasi masyarakat hanya 66,39%. Sementara pada Pilpres 2009 partisipasi masyarakat Kota Padang hanya 70,8%.¹⁰

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 28,9%.¹¹ Di tingkat Nasional persentase Golput pada Pilpres 2009 sebesar 27,77%.¹² Terkait dengan penggunaan hak pilih pada Pilpres 2009 yang berlangsung di Kota Padang, data menunjukkan bahwa sejumlah 29,2% pemilih terdaftar sebagai pemilih tetap ternyata tidak menggunakan hak pilihnya.¹³ Kondisi ini merupakan hal yang ironis apabila dikaitkan dengan upaya menumbuhkembangkan demokrasi.

Istilah Golput atau golongan putih di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak Pemilu di masa Orde Baru. Pada masa reformasi ini, ancaman Golput malah semakin meluas tidak hanya di tingkat Nasional (Pemilu), akan tetapi hingga di

¹⁰ Karjuni dkk. 2007. "Persepsi dan Kontrol Politik Masyarakat Kota Padang terhadap Pelaksanaan Pilkada Gubernur Provinsi Sumbar". *Laporan Hasil Penelitian*. Padang. Lembaga Pusat Penelitian UNP.

¹¹ KPU Provinsi Sumatera Barat, 2009.

¹² Sri Yanuarti. 2009. "Golput dan Pemilu di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik Kisruh Pemilu 2009*, 6 (1):25.

¹³ KPU Kota Padang, 2009.

tingkat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Awal Desember 2008 atau menjelang memasuki tahun Pemilu 2009, isu tentang Golput mulai disoroti kembali dengan menambahkan ide tentang fatwa haram. Menurut ketua MUI pusat bidang fatwa, KH. Ma'ruf Amin, MUI tidak mengeluarkan fatwa tanpa pertimbangan. Tetapi dari desakan masyarakat yang meminta *guidelines*, dan resah atas wacana Golput yang berkembang. Mengingat masalah Pemilu sangat krusial, maka putusnya tidak diambil di komisi fatwa tetapi melibatkan 700 ulama seluruh Indonesia dari semua kelompok/golongan, yaitu dalam Ijma' Ulama.¹⁴

Golput mulai populer di era tujuh puluhan dalam perpolitikan di Indonesia, yang dipelopori oleh Arif Budiman. Golongan ini timbul, akibat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 1971. Pemilu 1971 yang menurut kalangan aktivis kampus pada saat itu, merupakan ajang penipuan sistematis terhadap rakyat. Untuk menyikapi situasi tersebut, mereka melakukan apa yang disebut "*counter culture*". Untuk menggugat sistem politik yang ada.¹⁵

Para aktivis dan intelektual kritis menempatkan Golput sebagai protes politik yang bernilai sama pada semua situasi politik, serta mengabaikan perkembangan-perkembangan politik mutakhir. Sebagai misal, tidak sedikit aktifis maupun intelektual kritis yang mempersamakan efektifitas Golput pada era kediktatoran Orde Baru dengan periode pasang demokrasi liberal. Akibatnya, mereka kemudian terjebak pada "utopisme", bahwa Golput akan meradikalisasi demokrasi sehingga membuka jalan pada kejatuhan rezim dan model politik yang lama. Secara faktual fenomena Golput tidak hanya terjadi di negara demokrasi

¹⁴Muhaimin, *Golput dalam Optik Kaum Santri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 42-52

¹⁵Sri Yanuarti. 2009. "Golput dan Pemilu, hal. 22

yang sedang berkembang, di negara yang sudah maju dalam berdemokrasi pun juga menghadapi fenomena Golput, seperti di Amerika Serikat yang capaian angka partisipasi politik pemilihnya berkisar antara 50% s/d 60%, begitu pula di Perancis dan Belanda yang angka capaian partisipasi politik pemilihnya berkisar 86%.¹⁶

Realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya. Tentunya potensi Golput dalam pesta demokrasi Nasional maupun lokal tersebut kiranya cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Sebab potensi Golput yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi, karena merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik.¹⁷ Ada beberapa argumen yang dianggap penting dan sangat menarik untuk meneliti topik ini.

Pertama, Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilprespun dimasukkan ke dalam rezim Pemilu. Pilpres sebagai bagian dari Pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Di tingkat Nasional Persentase Golput pada Pilpres 2009 lebih tinggi dari pada Pilpres 2004. Persentase Golput di tingkat nasional pada Pilpres 2004 yang diadakan dua kali putaran, putaran pertama

¹⁶Soebagio. 2008. "Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia". *Makara Sosial Humaniora*, (Online), Vol. 11, No.1, (<http://repository.UI.ac.id/814c>, diakses 30 Mei 2012), hal.85

¹⁷ Ibid hal. 82-83

persentase Golput 21,8% sedangkan putaran kedua persentase Golputnya 23,4%. Pada Pilpres 2009 persentase Golput 27,77%.

Kedua, Kota Padang sejak zaman dahulunya dikenal sebagai barometer politik Sumatera Barat. Orang Padang dikenal tinggi kesadaran politiknya dan terbiasa hidup berdemokrasi dalam sejarahnya, akan tetapi pada Pilpres 2009 persentase Golput di Kota Padang lebih tinggi dari pada di tingkat nasional persentasenya sebesar 29,2% masyarakat Kota Padang tidak ikut memilih dan jumlah suara tidak sah 2,4 %. Sedangkan di tingkat Provinsi Sumatera Barat Persentase tidak memilih sebesar 28,9%. Berdasarkan sebaran lokasi, penelitian ini berada di pusat kota, semi pinggiran dan di pinggir Kota. Kecamatan Padang Barat merupakan daerah yang terletak di pusat Kota Padang. Kecamatan Koto Tangah termasuk daerah semi pinggiran, karena daerahnya tidak terlalu jauh dari pusat Kota dari pusat Kota Padang dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung daerah ini paling jauh dari Kota Padang.

Ketiga fenomena Golput merupakan gejala demokrasi yang paling menonjol. Golput berimplikasi terhadap realitas demokrasi di Indonesia. Potensi Golput dalam pesta demokrasi Nasional maupun lokal mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas.

Keempat sebelum Pemilu 2009, pada tanggal 26 Januari 2009, MUI mengeluarkan fatwa tentang Golput itu haram. Menurut ketua MUI pusat bidang fatwa, KH. Ma'ruf Amin, MUI tidak mengeluarkan fatwa tanpa pertimbangan. Tetapi dari desakan masyarakat yang meminta *guidelines*, dan resah atas wacana Golput yang berkembang. Bertolak dari hal tersebut penulis tertarik untuk

meneliti dengan judul “**Golongan Putih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2009 di Kota Padang**”.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses pemilih menjadi Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009?
2. Kenapa tinggi persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009?
3. Apa akibat tingginya persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 bagi demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses pemilih menjadi Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009
2. Mengidentifikasi faktor penyebab tingginya persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009
3. Menjelaskan akibat tingginya persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 bagi demokrasi Indonesia

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara umum manfaat penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah kontemporer yang mengkaji

Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pemahaman peneliti tentang adanya Golput dalam Pemilu
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga terkait, khususnya KPU Kota Padang
- c. Menambah literatur kepustakaan, dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB V

TEMUAN KHUSUS

Sesuai dengan rumusan masalah pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal yaitu, proses pemilih menjadi Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009, faktor penyebab tingginya persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 dan akibat tingginya persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 bagi demokrasi.

A. Proses Pemilih menjadi Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009

Pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung pertama kali diadakan pada Pemilu 2004. Sebelumnya, pemilihan Presiden diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pilpres 2004 diadakan dua kali putaran, pada putaran pertama ada lima kandidat yang bertarung. *Pertama* H. Wiranto, SH dan wakilnya Ir. H. Salahuddin Wahid. *Kedua* Hj. Megawati Soekarno Putri dan wakilnya KH. A. Hasyim Muzadi. *Ketiga* Prof. DR. H. M. Amien Rais dan wakilnya DR. Ir. H. Siswono Yudo Husodo. *Keempat* H. Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. *Kelima* DR. H. Hamzah Haz dan wakilnya H. Agung Gumelar, MSc. Kandidat yang berhasil masuk kedalam putaran kedua dari lima kandidat tersebut adalah, Hj. Megawati Soekarno Putri wakilnya KH. A. Hasyim Muzadi dan H. Susilo Bambang Yudhoyono wakilnya Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla berhasil masuk dalam putaran kedua pemilihan Presiden, dalam pertarungan tersebut pemenangnya

adalah H. Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.

Sementara pada Pilpres 2009 ini ada tiga kandidat. *Pertama*, Hj. Megawati Soekarno Putri dan wakilnya H. Prabowo Subianto. *Kedua*, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Prof. DR. Boediono. *Ketiga*, H. M. Jusuf Kalla dan wakilnya H. Wiranto. Untuk lebih jelasnya partisipasi masyarakat Kota Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5: Rekapitulasi Pemilih Terdaftar Menggunakan Hak Pilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Presiden 2009 di Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih			
		Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Suara Tidak Sah
1	Padang Selatan	42.420	26.635	12.785	985
2	Padang Timur	58.067	40.073	17.994	876
3	Padang Barat	38.396	25.504	12.892	652
4	Padang Utara	44.591	28.913	15.678	783
5	Bungus Teluk Kabung	14.768	11.152	3.616	403
6	Lubuk Begalung	70.854	53.175	17.679	1.197
7	Lubuk Kilangan	33.051	23.296	9.755	758
8	Pauh	36.785	25.750	11.035	582
9	Kuranji	85.037	58.759	26.278	1.288
10	Nanggalo	38.386	26.904	11.482	674
11	Koto Tengah	108.714	74.502	34.212	1.556
	Jumlah	571.069	397.663	173.406	9.754

Sumber: KPU Kota Padang, 2009.

Berdasarkan sebaran lokasi, lokasi penelitian ini berada di pusat kota, semi pinggiran dan di pinggir Kota. *Pertama*, di Kecamatan Padang Barat karena kecamatan ini merupakan daerah yang terletak di pusat Kota Padang persentase tidak memilihnya 33,6% dan suara tidak sah 2,5%. *Kedua*, di Kecamatan Koto

Tengah karena termasuk daerah semi pinggiran karena daerahnya tidak terlalu jauh dari pusat Kota persentase tidak memilihnya sebesar 31,4% dan jumlah suara tidak sah 2,09%. *Ketiga*, di Kecamatan Bungus Teluk Kabung daerah ini paling jauh dari Kota Padang persentase tidak memilih 24,5% dan suara tidak sah 3,7%.

Asrinaldi pengamat politik dari FISIP UNAND menjelaskan bahwa Golput adalah:

“Golput itu adalah orang-orang yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap dan dia tidak datang ke TPS karena kesadarannya untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan yang kedua adalah orang yang terdaftar dan dia datang ke TPS akan tetapi dia menggunakan hak pilihnya dengan kesadarannya secara tidak benar atau merusaknya. Hal kedua tersebut dikatakan Golput karena kesadaran politiknya yang membuat seseorang kecewa dengan Pemilu. Misalnya saya pada hari H ingin ikut memilih akan tetapi pada hari H tersebut anak saya sakit saya pergi mengantar anak saya pergi berobat dan akhirnya saya tidak ikut memilih, hal tersebut bukan Golput, karena saya sudah punya keinginan untuk memilih, akan tetapi kalau seandainya pada hari H saya sudah punya keinginan untuk tidak memilih karena alasan saya, Pemilu itu tidak bermanfaat itu artinya saya Golput. Orang tua yang salah coblos karena tidak tau tata cara mencoblos sementara dia punya keinginan untuk memilih, itu juga bukan Golput. Pada umumnya orang mengeneralisasikan Golput itu adalah orang yang tidak datang ke TPS. Mengeneralisasikan Golput itu salah, tapi kalau Golput itu di klasifikasikan tidak apa-apa, misalnya sekian persen Golput politik, sekian persen Golput teknis dan lain-lain”.¹²⁸

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Hari Efendi Iskandar sebagai Aktivis sosial politik dari UNAND

“Golput dalam arti sesungguhnya sesuai dengan konsep-konsep dan pemahaman teoritis. Mungkin kalangan menengah atau kalangan terdidik bisa jadi dia profesional, akademisi, dan pengusaha dengan alasan rasional atau ketidakpercayaan kepada partai politik. Tapi di basis akar rumput mereka bukan Golput,

¹²⁸ Wawancara dengan Asrinaldi, sebagai pengamat politik dari UNAND, Kampus UNAND Limau Manis, 21 Februari 2013 jam 01.20

mereka tidak memilih itu karena alasan teknis. Karena saya lihat faktor tingginya angka Golput pada Pemilu 2009 itu karena masalah DPT. Artinya karena faktor teknis tidak terdaftar atau kesibukan aktivitas ekonomi. Orang yang Golput itu adalah orang yang punya kesadaran, mereka tidak percaya kepada perilaku elit politik dan partai politik.¹²⁹

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Sri Zul Chairiyah sebagai konsultan politik PISIP UNAND menjelaskan

“Golput itu tidak datang ke TPS dan tidak ikut memilih. Golput itu sebenarnya sudah mengambil keputusan untuk tidak datang KTPS, dan sudah berpartisipasi untuk tidak ikut memilih. Ada bermacam-macam alasan seperti sibuk dan tidak percaya kepada penyelenggara. Ada juga kaum intelektual yang Golput karena merasa malu datang KTPS bergabung dengan orang-orang miskin dan merasa terhina untuk datang KTPS itu artinya dia tidak mengerti dengan hak politik”.¹³⁰

1. Proses Pemilih Menjadi Golput di Kecamatan Padang Barat pada Pilpres 2009

Kecamatan Padang Barat adalah salah satu daerah yang terletak di pusat Kota Padang. Pendidikan Penduduknya rata-rata tamat SI dan kebanyakan bekerja sebagai PNS dan pegawai swasta, pedagang. Persentase tidak memilih di Kecamatan ini 33,6% dan suara tidak sah 2,5% pada Pilpres 2009.

¹²⁹ Wawancara dengan Hari Efendi Iskandar, Aktivis sosial politik UNAND, Kampus UNAND Limau Manis, 9 Februari 2013 jam 11

¹³⁰ Wawancara dengan Sri Zul Chairiyah, sebagai konsultan politik, kompleks Palimo Indah Blok L/11-Padang 12 Februari 2013 jam 9.30

Tabel 6: Profil Golput di Kecamatan Padang Barat

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Musril	Lk	30	SD	Pedagang
2	Khadijah	Pr	60	SD	Pedagang
3	Riyan	Lk	21	SMA	Mahasiswa
4	Riko	Lk	27	SI	Pegawai Swasta
5	Angga Kurniawan	Lk	25	SI	Pegawai Swasta
6	Robi Putra	Lk	29	D3	PNS
7	Teguh	Lk	41	SMA	Pedagang
8	Nurjannah	Pr	30	D3	PNS
9	Gustinar	Pr	40	SI	PNS
10	Dede Anung	Lk	23	SI	PNS
11	Amdra	Lk	39	SMA	Pedagang
12	Dafrizal	Lk	33	SI	Pegawai Swasta
13	Lukman Iskandar	Lk	21	SMA	Mahasiswa

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang yang Golput pada Pilpres 2009 di Kecamatan Padang Barat sebanyak 13 informan didominasi oleh laki-laki, pendidikan terakhirnya yang paling banyak SI selebihnya SD, SMA dan D3. Pekerjaan yang paling banyak adalah PNS dan pegawai swasta selebihnya pedagang, dan mahasiswa.

a. Golput Teknis

Tabel 7: Profil Golput Teknis di Kecamatan Padang Barat

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Khadijah	Pr	60	SD	Pedagang
2	Riyan	Lk	21	SMA	Mahasiswa
3	Robi Putra	Lk	29	D3	PNS
4	Nurjannah	Pr	30	D3	PNS
5	Gustinar	Pr	40	SI	PNS

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang-orang yang Golput teknis pada Pilpres 2009 di Kecamatan Padang Barat sebanyak lima informan dan umurnya dari 21-60 tahun dan pekerjaannya paling banyak adalah PNS dan pendidikan terakhirnya adalah SMA, D3, SI. Sebagaimana diungkapkan oleh informan Khadijah berusia 60 tahun sebagai pedagang

“Amak ndak ikuik memilih Pemilu SBY yang kaduo tu do, karano amak sakik waktu itu, waktu Pemilu SBY yang pertama amak lai ikuik. Amak mamilih SBY. Amak lai ikuik taruih mamilihnyo, iko dek amak lah tuo dan amak sakik pulo tu makonyo amak ndak ikuik memilih patang. Untuk Pemilu yang akan datang amak ndak ikuik lai do, amak sakik dan amak lah tuo pulo”.

(“Ibu tidak ikut memilih Pemilu SBY yang kedua itu, karena ibu sakit waktu itu, waktu Pemilu SBY yang pertama amak lai ikuik. Ibu memilih SBY. Ibu selalu ikut memilih, ini karena ibu sakit dan usia ibu juga sudah tua makanya ibu tidak ikut memilih kemaren. Untuk Pemilu yang akan datang Ibu tidak ikut memilih lagi karena ibu sakit dan ibu sudah tua”).¹³¹

b. Golput Teknis Politis

Tabel 8: Profil Golput Teknis Politis di Kecamatan Padang Barat

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Lukman Iskandar	Lk	21	SMA	Mahasiswa

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang yang Golput teknis politis pada Pilpres 2009 di Kecamatan Padang Barat hanya satu informan yang berjenis kelamin laki-laki umurnya 21 tahun pendidikan terakhirnya SMA dan Pekerjaannya mahasiswa. Sebagaimana diungkapkan oleh informan.

¹³¹ Wawancara dengan Khadijah, Pedagang, Purus. 21 Februari 2013 jam 02.00

“Saya tidak ikut memilih pada Pilpres 2009 karena tidak ada undangan yang saya terima, saya tidak pergi mengurus itu karena saya menyetujui siapa saja yang akan menjadi Presiden. Pada Pilpres 2004 saya ikut memilih baik putaran pertama maupun putaran kedua. Saya ikut memilih pada Pilpres 2004 saya ikut memilih karena undangannya memang saya terima. Partai yang saya pilih pada Pilpres 2004 itu adalah partai Demokrat. Untuk Pilpres 2014 nanti saya tidak ikut lagi karena korupsi merajalela, saya tidak mau memilih orang maling menjadi pemimpin”.¹³²

c. Golput Politis

Tabel 9: Profil Golput Politis di Kecamatan Padang Barat

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Angga Kurniawan	Lk	25	SI	Pegawai Swasta
2	Teguh	Lk	41	SMA	Pedagang
3	Dede Anung	Lk	23	SI	PNS
4	Amdra	Lk	39	SMA	Pedagang
5	Dafrizal	Lk	33	SI	Pegawai Swasta
6	Riko	Lk	27	SI	Pegawai Swasta

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang-orang yang Golput politis pada Pilpres 2009 di Kecamatan Padang Barat didominasi oleh laki-laki sebanyak 6 informan dan umurnya mulai dari 23-41 termasuk usia produktif dan pekerjaannya paling banyak adalah pedagang dan pendidikan terakhirnya yang paling banyak adalah SMA dan SI. Berdasarkan data yang didapatkan Pada Pilpres 2009 yang lalu di Kecamatan Padang Barat ada yang ikut memilih akan tetapi tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan unsur

¹³² Wawancara dengan Lukman, Mahasiswa, Ujung Gurun. 19 Februari 2013 jam 04.30

kesengajaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota PPS Sri Ramatina, SPS. I

“Saya mendapatkan informasi bahwasanya orang-orang yang ikut memilih di TPS 3 Kelurahan Olo banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, padahal mereka tau tata cara dalam Pemilu, akan tetapi mereka sengaja menghanguskan kertas suaranya”.¹³³

Sebagaimana diungkapkan oleh informan Dafrizal yang berumur 33 tahun sebagai pegawai swasta.

“Pemilu 2004 putaran pertama dan putaran kedua saya ikut memilih dan saya memilih partai Demokrat. Pemilihan Presiden pada tahun 2009 yang lalu saya datang ke TPS dan saya ikut memilih, akan tetapi saya tidak mencoblos dengan benar, saya menusuk dua gambar partai. Yang saya tusuk partai Golkar sama Demokrat, karena mencoblos dengan benarpun tidak akan merubah keadaan, Indonesia juga akan seperti ini. Calon pemimpin yang akan menang juga tidak akan bisa merubah keadaan ke arah yang lebih baik kehidupan negara ini”.¹³⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Angga Kurniawan yang berumur 25 tahun sebagai pegawai swasta

“Saya datang ke TPS pada Pilpres 2009 yang lalu tapi saya memang tidak mencoblos dengan benar, saya mencoblos disembarang tempat, saya sengaja untuk menggagalkan suara saya. Itukan partisipasi juga karena saya sudah datang ke TPS, saya ingin dengan terpilihnya seseorang menjadi Presiden memang harus bertanggung jawab terhadap negaranya, tapi yang selama ini saya lihat Presiden hanya memikirkan kepentingannya sendiri, janji-janji yang dibuat banyak diabaikan, Korupsi juga semakin meningkat. Pilpres 2004 yang dulu putaran pertama saya ikut memilih tapi putaran kedua saya tidak ikut memilih lagi, karena saya hanya menginginkan Amin Rais sebagai Presiden karena menurut saya orangnya tidak plinplan, selain itu agamanya juga kuat, Pilpres

¹³³ Wawancaradengan Sri Ramatina, anggota PPS, jln Samudera 90 B Koto Marapak, 17 Januari jam 01.20

¹³⁴ Wawancara dengan Dafrizal, pegawai swasta. Kelurahan Olo. jln Samudera No 88, 17 Februari jam 03.00

2014 nanti saya juga tidak akan ikut memilih karena tidak ada kandidat yang baik menurut saya”.¹³⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Riko berusia 27 tahun sebagai pegawai swasta

“Pilpres 2004 putaran pertama saya ikut memilih partai yang saya pilih adalah partai Demokrat dan pada putaran kedua saya tidak ikut memilih karena saya sudah bosan Pemilu pemilu terus. Pada Pilpres 2009 saya datang ke TPS, tapi saya tidak menggunakan hak pilih secara benar, saya merobek sedikit kertas suara. Pilpres 2014 nanti saya tidak akan datang ke TPS dan saya tidak ikut memilih karena bagi saya semua kandidat itu sama saja tidak bisa mengatasi masalah yang ada dinegaranya seperti korupsi”.¹³⁶

2. Proses Pemilih Menjadi Golput di Kecamatan Koto Tangah pada Pilpres

2009

Kecamatan Koto Tangah adalah daerah semi pinggiran karena daerahnya tidak terlalu jauh dari pusat Kota dan juga merupakan salah satu lumbung padi di Kota Padang. Jumlah penduduk Kecamatan Koto Tangah adalah jumlah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yang ada di Kota Padang. Berdasarkan informasi yang didapatkan pendidikan penduduk di Kecamatan Koto Tangah rata-rata tamat SMA dan mata pencahariannya seperti pedagang, petani dan nelayan. Berdasarkan data yang didapatkan dari KPU Kota Padang persentase tidak memilihnya sebesar 31,4% dan jumlah suara tidak sah 2,09%. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua RW I Parupuk Tabing Alwiandri SE berumur 42 tahun

¹³⁵ Wawancaradengan Angga Kurniawan, Pegawai Swasta, Kelurahan Olo. 17 Februari jam 05.00

¹³⁶ Wawancara dengan Riko, Pegawai Swasta, Padang Pasir, 19 Februari jam 03.20

“Pilpres 2009 kemaren memang banyak warga saya yang tidak ikut dalam memilih Presiden. Orang yang tidak ikut memilih bukan saja dari orang-orang yang berpendidikan rendah orang-orang yang berpendidikan tinggi juga banyak yang tidak ikut memilih, seperti yang saya lihat, seperti mahasiswa, pegawai, saya sebagai ketua RW sudah mengajak masyarakat saya untuk ikut serta dalam Pilpres 2009, akan tetapi kebanyakan mereka lebih memilih aktifitas lain dari pada ikut Pemilu.”¹³⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syahril berumur 47 tahun sebagai

Ketua RT 01 RW 02

“Orang yang tidak ikut memilih di daerah saya ini memang ada tapi mereka tidak ikut memilih memang karena alasan tidak sempat datang ke TPS seperti alasan kerja dan pulang kampung pada hari Pemilu karena Pemilu pada hari libur, mereka tidak ikut memilih bukan karena alasan lain tapi karena tidak sempat hadir”.¹³⁸

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Resti Yuliarti Anisa, SE berumur 28

tahun sebagai anggota PPS

“Orang-orang yang tidak ikut memilih pada Pilpres 2009 di daerah saya khususnya kelurahan Koto Panjang Ikua Koto adalah pemuda-pemuda yang bermasalah dengan panitia PPS. Kebanyakan di daerah ini banyak yang ikut memilih pada pemilihan Presiden dan hanya sebagian kecil yang tidak ikut memilih”.¹³⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Indra Doni sebagai anggota PPS

yang berumur 33 tahun

“Kalau pemilihan legislatif memang banyak di daerah ini yang tidak ikut memilih tapi pemilihan Presiden 2009 dan Pilkada 2008

¹³⁷ Wawancara dengan Alwiandri, SE, Ketua Rw I Parupuk Tabing, jln Aren no 25 RT2 RW1, 24 Januari 2013. Jam 04.00

¹³⁸ Wawancara dengan Syahril, Ketua RT 01 RW 02, Parupuk Tabing jln Pelumas 21 C, 23 Januari jam 11.00

¹³⁹ Wawancara dengan Resti Yuliarti Anisa, SE. Anggota PPS. Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, 01 Februari 2013 jam 01.00

yang lalu masyarakat di daerah ini banyak yang ikut memilih. Memang pada Pilpres 2009 kemaren ada orang yang tidak ikut memilih karena ada masalah dengan panitia PPS, Pemuda-pemuda disini ingin menjadi anggota PPS akan tetapi mereka tidak ditunjuk”.¹⁴⁰

Tabel 10: Profil Golput di Kecamatan Koto Tengah

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Yarnalis	Pr	64	SD	Ibu Rumah
2	Bainar	Pr	75	SD	Pedagang
3	Bahar	Lk	76	SD	Pedagang
4	Khairiyah	Pr	22	SMA	Mahasiswi
5	Yanti	Pr	23	SI	Pegawai swasta
6	Desvriani	Pr	39	SMA	Pedagang
7	Farida	Lk	30	SI	Guru
8	Safri	Lk	45	SMP	Sopir
9	Edi Saputra	Lk	25	SMA	Pedagang
10	Muliyannur	Lk	33	SI	PNS
11	Herlinda	Pr	40	D3	Pedagang
12	Diki	Lk	24	D3	Pedagang
13	Amrizal	Lk	43	SMA	Petani
14	Eri	Lk	40	SMA	Pedagang
15	opi Patra	Lk	25	SMA	kang Ojek
16	Joni Indrawandi	Lk	28	SI	Mahasiswa
17	Reprianto	Lk	38	SI	Dosen
18	Martina	Pr	50	SMA	Pedagang
19	Leni Marlina	Pr	32	SMA	Wiraswasta
20	Solihin	Lk	51	SD	Nelayan
21	Jimmy	Lk	24	SMA	Tukang Ojek
22	Idrus	Lk	51	SD	Pedagang
23	Nia Dwi Mawar	Pr	23	SMA	Mahasiswa
24	Sria Amanah	Pr	24	SMA	Mahasiswa
25	Armen	Lk	59	SMP	Sopir

Sumber: Wawancara

¹⁴⁰ Wawancara dengan Indra Doni. Anggota PPS. Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, 01 Februari 2013 jam 11.00

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang-orang yang Golput pada Pilpres 2009 di Kecamatan Koto Tengah sebanyak 25 informan didominasi oleh laki-laki dan pendidikan terakhirnya yang paling banyak adalah SMA selebihnya SD, SMP, D3, SI. Pekerjaannya paling banyak adalah pedagang selebihnya wiraswasta, tukang ojek, sopir, nelayan, petani, PNS, pegawai swasta, dosen dan mahasiswa. Adapun bentuk-bentuk Golput di Kecamatan ini adalah seperti yang dibawah ini.

a. Golput Teknis

Tabel 11: Profil Golput Teknis di Kecamatan Koto Tengah

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Yarnalis	Pr	64	SD	Ibu Rumah Tangga
	Bainar	Pr	75	SD	Pedagang
	Bahar	Lk	76	SD	Pedagang
	Khairiyah	Pr	22	SMA	Mahasiswi
	Yanti	Pr	23	SI	Pegawai swasta
	Desvriani	Pr	39	SMA	Pedagang
	Farida	Lk	30	SI	Guru
	Safri	Lk	45	SMP	Sopir
	Edi Saputra	Lk	25	SMA	Pedagang

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang-orang yang Golput teknis pada Pilpres 2009 di Kecamatan Koto Tengah didominasi oleh perempuan itu sebanyak Sembilan informan dan umurnya dari 22-76 dan pekerjaannya paling banyak adalah pedagang dan pendidikan terakhir informan adalah SD, SMA, dan SI dan sopir. Berdasarkan hasil penelitian lapangan

seorang informan Yanti berusia 23 tahun yang bekerja sebagai pegawai swasta menjelaskan

“Saya tidak ikut memilih pada pemilihan Presiden 2009 yang lalu karena saya pulang kampung, karena pemilihan hari libur makanya saya pulang sebelum hari pemilihan. Pada Pilpres 2004 pada putaran pertama saya ikut memilih akan tetapi pada putaran kedua saya tidak ikut memilih karena saya sibuk bekerja, partai yang saya pilih partai Demokrat, untuk Pemilihan Presiden yang akan datang kemungkinan saya ikut kemungkinan juga tidak, karena hari besok tidak bisa kita pastikan”.¹⁴¹

Hal senada juga diungkapkan oleh informan Safri yang berusia 45 tahun yang bekerja sebagai sopir

“Pemilihan Presiden 2009 saya tidak ikut memilih, karena saya tidak ada ditempat saya menjemput barang ke luar kota, itupun mendadak diberitahukan kepada saya makanya saya tidak ikut memilih, barang itu harus saya jemput karena itu adalah kerja saya. Pemilihan presiden 2004 saya ikut memilih karena saya ada ditempat, dan saya memilih partai PDI untuk Pilpres 2014 nanti saya belum melihat calon-calonnya, mungkin juga saya tidak memilih karena semua orang berlomba-lomba ingin jadi pemimpin, setelah dia menjabat rakyat dia lupakan.”¹⁴²

Hal yang berbeda diungkapkan oleh informan Edi Saputra berusia 25 tahun bekerja sebagai pedagang

“Saya tidak ikut memilih pada Pilpres 2009 yang lalu, karena kami tidak menyukai panitia-panitia TPS. Saya tidak menyukai panitianya, salah satu panitianya adalah garim mesjid, seharusnya tidak garim mesjid yang ditunjuk sebagai panitia, sedangkan kami pemuda-pemuda disini tidak ditunjuk untuk menjadi panitia. Pada pilpres 2004 yang lalu saya ikut memilih, partai yang pilih adalah partai Demokrat”.¹⁴³

¹⁴¹ Wawancara dengan Yanti, pegawai swasta, Parupuk Tabing, 25 Januari 2013 jam. 05.00

¹⁴² Wawancara dengan Safri, Sopir, Koto Panjang Ikua Koto, 25 Januari jam 01.00

¹⁴³ Wawancara dengan Edi Saputra, pedagang, Koto Panjang Ikua Koto, 25 Januari jam 02.00

b. Golput Teknis Politis

Tabel 12: Profil Golput Teknis Politis di Kecamatan Koto Tangah

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Muliyannur	Lk	33	SI	PNS

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang-orang yang Golput teknis politis pada Pilpres 2009 di Kecamatan Koto Tangah hanya satu informan dan bekerja sebagai PNS. Pendidikan terakhirnya SI. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Muliyannur berusia 33 tahun bekerja sebagai PNS

“Pilpres 2009 yang lalu saya tidak ikut memilih karena DPT saya tidak di Padang akan tetapi DPT saya di Bukittinggi, sebelum Pilpres 2009 saya sudah menetap di Padang, sebenarnya bisa diurus tapi pada waktu itu saya malas juga mengurus DPT karena kerja saya banyak, pada Pilpres 2004 yang lalu pada putaran pertama saya ikut memilih dan saya memilih partai Demokrat tetapi pada putaran kedua saya tidak ikut lagi memilih karena saya tidak ditempatkan pada waktu itu. Untuk Pemilu berikutnya saya akan ikut memilih jika undangan ada sama saya”¹⁴⁴

c. Golput Politis

Tabel 13: Profil Golput Politis di Kecamatan Koto Tangah

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Herlinda	Pr	40	D3	Pedagang
2	Diki	Lk	24	D3	Pedagang
3	Amrizal	Lk	43	SMA	Petani
4	Eri	Lk	40	SMA	Pedagang
5	Ipi Patra	Lk	25	SMA	kang Ojek

¹⁴⁴ Wawancara dengan Muliyannur, PNS, Parupuk Tabing, 26 Januari 2013 jam 4.00

6	Joni Indrawandi	Lk	28	SI	Mahasiswa
7	Reprianto	Lk	38	SI	Dosen
8	Martina	Pr	50	SMA	Pedagang
9	Leni Marlina	Pr	32	SMA	Wiraswasta
10	Solihin	Lk	51	SD	Nelayan
11	Jimmy	Lk	24	SMA	Tukang Ojek
12	Idrus	Lk	51	SD	Pedagang
13	Nia Dwi Mawar	Pr	23	SMA	Mahasiswa
14	Sria Amanah	Pr	24	SMA	Mahasiswa
15	Armen	Lk	59	SMP	Sopir

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang-orang yang Golput politis pada Pilpres 2009 di Kecamatan Koto Tangah berjumlah 15 orang. Informan Golput Politis didominasi oleh laki-laki, dan pendidikan terakhirnya yang paling banyak adalah SMA dan umurnya dari 23-51 termasuk usia produktif, dan pekerjaannya paling banyak adalah pedagang selebihnya wiraswasta, Mahasiswa, petani, nelayan, tukang ojek, sopir, guru, dan dosen. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua PPS Dayati, SH yang berusia 55 tahun

“Setiap Pemilu pasti ada yang tidak ikut memilih di Tunggul Hitam di daerah saya banyak juga yang tidak ikut memilih karena mereka tidak percaya kepada pemimpin yang hanya memberikan janji-janji tanpa bukti. Mereka tidak mau tau dengan Negara karena bagi mereka urusan pribadi lebih penting dari pada Pemilu”.¹⁴⁵

Sebagaimana diungkapkan oleh diungkapkan oleh informan Joni Indrawandi berusia 28 tahun sebagai mahasiswa.

“Saya tidak ikut memilih pada Pilpres 2009 itu karena calon-calon Presiden 2009 itu menurut saya tidak ada yang menarik, dari beberapa calon tersebut tidak satupun yang saya sukai, calon-calon

¹⁴⁵ Wawancara dengan Dayati, SH, Anggota PPS. Dadok Tunggul Hitam 27 Januari 2013 jam 11.00

tersebut menurut saya acuh tak acuh terhadap Negara, dan kemenangan SBY tersebut menurut saya banyak manipulasi dan solusinya Pemilu harus diulang lagi”. Pemilihan Presiden 2004 putaran pertama saya ikut memilih dan saya memilih partai PKS, karena PKS itu partai yang besar dan mempunyai nilai-nilai islamnya tinggi, putaran kedua saya tidak ikut memilih karena saya tidak menyukai calonnya, untuk Pemilu yang akan datang saya ikut memilih apabila Presiden yang dicalonkan itu benar-benar bisa merakyat dan Islamnya kuat, misalnya seperti Dahlan Iskan.¹⁴⁶

Hal yang senada diungkapkan oleh Zulbadri yang berusia 36 tahun sebagai ketua PPS

“Hasil dari Pilpres 2009 itu menurut saya banyak direayasa. Saya sebagai ketua PPS pada Pilpres 2009 Pilpres ini ada istilah kotak suara pergi shalat artinya kotak suara itu pergi kemana-mana artinya adanya manipulasi data.”¹⁴⁷

Sebagaimana juga diungkapkan oleh Amrizal berusia 43 tahun bekerja sebagai petani

“Saya tidak ikut memilih pada Pilpres 2009 karena tidak ada calon yang saya sukai pada Pilpres 2009, calonnya tidak merakyat, korupsi banyak. tapi Pilkada di Kota Padang kemaren dimana Fauzi Bahar sebagai calonnya makanya saya ikut memilih, karena Fauzi Bahar berasal dari daerah saya. Kalau sekiranya calon Presiden dari daerah saya maka saya akan ikut memilih. Pada Pilpres 2004 kemaren saya ikut memilih kedua kali putaran, saya memilih partai PKS, putaran kedua saya tidak ikut lagi karena saya hanya mau memilih kandidat yang agama Islamnya kuat. Untuk Pilpres 2014 saya tidak ikut lagi memilih karena menurut saya calon-calonnya tidak ada yang menarik, apalagi korupsi banyak.”¹⁴⁸

¹⁴⁶ Wawancara dengan Joni Indrawandi, mahasiswa, Koto Pulai 28 Januari 2013 jam 04.30

¹⁴⁷ Wawancara dengan Zulbadri, Ketua PPS, Koto Marapak Kelurahan Olo, 27 Januari jam 03.10

¹⁴⁸ Wawancara dengan Amrizal, petani, Koto Panjang Ikua Koto, 25 Januari 2013 jam 01.00

Hal yang berbeda diungkapkan Armen berusia 59 tahun bekerja sebagai sopir

“Saya tidak pernah ikut memilih, karena ikut memilih hanya menambah kerja bagi saya, untung dan ruginya juga tidak ada walaupun saya ikut memilih. yang kaya akan semakin kaya sedangkan saya juga akan seperti ini. Bagi saya ikut memilih itu hanya buang-buang waktu belaka, karena perubahan tidak ada yang nampak, siapapun yang menjabat kehidupan saya juga akan seperti ini untuk Pemilu 2014 nanti saya juga tidak akan ikut memilih, saya tidak ikut memilih atas kehendak saya sendiri, tapi anak-anak dan istri saya juga tidak ikut memilih, mungkin ibarat kereta api kalau kepalanya tidak ikut berarti yang lainnya juga tidak ikut, tapi saya tidak ada mengajak mereka untuk tidak ikut memilih ”.¹⁴⁹

3. Proses Pemilih Menjadi Golput di Kecamatan Bungus Teluk Kabung pada Pilpres 2009

Kecamatan Bungus Teluk Kabung terletak di pinggiran pantai. Sampai akhir tahun 2011 Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki 6 (enam) kelurahan dan pada masing-masing kelurahan terdapat RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan klasifikasi kelurahan menurut tingkat perkembangan, semua Kelurahan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah kelurahan Swakarya. Kelurahan Swakarya atau kelurahan maju yaitu kelurahan yang dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik kelurahan belum maksimal.¹⁵⁰ Penduduknya sedikit, mata pencaharian masyarakat Bungus Teluk Kabung rata-rata nelayan dan rata-rata berpendidikan menengah. Sebagaimana dijelaskan oleh Jafril Tanjung sebagai aktivis partai PAN

¹⁴⁹ Wawancara dengan Armen, Pedagang, Parak Anau Sakato Tigo, 26 Januari jam 05.00

¹⁵⁰ Badan Pusat Statistik 2009

“Orang-orang yang Golput pada Pilpres 2009 di Kecamatan Koto Tangah ini berasal dari golongan yang sumber daya manusia (SDM) nya rendah. Mereka merasa tidak terpanggil untuk memilih dan tidak punya keinginan untuk memilih”.¹⁵¹

Tabel 14: Profil Golput di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Didin	Lk	26	SMA	Nelayan
2	Rasidin	Lk	39	SMP	Tukang Ojek
3	Ahmad Porang	Lk	33	SMP	Nelayan
4	Nasril	Lk	43	SD	Buruh
5	Anisa	Pr	36	SMP	Ibu Rumah Tangga
6	Emi	Pr	32	SMP	Ibu Rumah Tangga
7	Jasman	Lk	47	SMA	Wiraswasta
8	Erman	Lk	44	SMP	Nelayan

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang yang Golput pada Pilpres 2009 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak delapan informan. Informan didominasi oleh laki-laki, pendidikan terakhirnya yang paling banyak adalah SMP dan pekerjaan yang paling banyak adalah nelayan, ibu rumah tangga, pedagang, wiraswasta, tukang ojek.

a. Golput Teknis

Tabel 15: Profil Golput Teknis di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Didin	Lk	26	SMA	Nelayan
2	Rasidin	Lk	39	SMP	Tukang Ojek

Sumber: Wawancara

¹⁵¹ Wawancara dengan Jafril, sebagai Aktivis Paratai Pan, Bungus Selatan. 14 Januari 2013 jam 12.47

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang-orang yang Golput teknis pada Pilpres 2009 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung didominasi oleh laki-laki sebanyak dua informan dan umurnya dari 26-39, pekerjaannya adalah nelayan dan tukang ojek, pendidikan terakhirnya adalah SMP dan SMA. Sebagaimana diungkapkan oleh informan Didin yang berusia 26 tahun bekerja sebagai nelayan

“Saya tidak ikut memilih pada Pilpres 2009 karena saya pergi melaut, sebelum pemilu saya sudah melaut, saya tidak bisa pulang untuk ikut Pemilu. Karena pekerjaan saya, kalau saya ada dirumah saya akan ikut memilih, karena pekerjaan saya tidak bisa ditinggalkan oleh karena itu saya tidak ikut memilih. Pilpres 2004 yang lalu saya ikut, saya memilih partai Demokrat, karena pada waktu itu saya memang ada ditempat, untuk Pilpres yang akan datang saya tidak ikut memilih karena presiden itu hanya mengumbar janji-janji saya, tanpa ada buktinya”.¹⁵²

b. Golput Teknis Politis

Tabel 16: Profil Golput Teknis Politis di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Ahmad Porang	Lk	33	SMP	Nelayan

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang yang Golput teknis politis pada Pilpres 2009 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak satu orang bekerja sebagai nelayan dan pendidikan terakhirnya SMP. Sebagaimana diungkapkan oleh informan bekerja sebagai nelayan.

“Saya tidak ikut memilih pada Pilpres 2009 kemaren itu, karena undangan untuk memilih itu tidak ada sama saya, kalau tidak diundang ngapain kita ikut. Pemilu Presiden 2004 kemaren saya ikut karena kemaren saya mendapatkan undangan untuk ikut

¹⁵² Wawancara dengan Didin, nelayan. Bungus Timur, 14 Februari 2013 jam 12.00

memilih. Pemilu Presiden yang akan datang saya tidak ikut memilih lagi karena tidak ada untungnya bagi saya, hidup saya juga akan seperti ini“.¹⁵³

c. Golput Politis

Tabel 17: Profil Golput Politik di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Nasril	Lk	43	SD	Buruh
2	Anisa	Pr	36	SMP	Ibu Rumah Tangga
3	Emi	Pr	32	SMP	Ibu Rumah Tangga
4	Jasman	Lk	47	SMA	Wiraswasta
5	Erman	Lk	44	SMP	Nelayan

Sumber: Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwasanya profil orang-orang yang Golput politik pada Pilpres 2009 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung didominasi oleh laki-laki itu sebanyak lima informan, pendidikan terakhirnya yang paling banyak adalah SMP, umurnya dari 32-44 dan pekerjaannya paling banyak adalah Ibu rumah tangga, Buruh, wiraswasta dan nelayan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasril bekerja sebagai buruh

“Saya tidak ikut memilih pada Pilpres 2009 karena saya bekerja sebagai buruh di PT sengkeong (pabrik papan triplek ditutup mati) karena menurut mereka penjualan tidak sesuai dengan pembelian. Karyawannya sangat banyak sekali, mata pencaharian kami hanya di sana. Pada Pilpres 2004 saya ikut memilih saya memilih partai Demokrat pada waktu itu. Sejak SBY ini menjabat sebagai Presiden PT Sengkeong ini ditutup sampai sekarang. Pada Pilpres 2014 nanti saya tidak akan ikut memilih, saya akan memilih apabila PT Sengkeong tersebut dihidupkan kembali”.¹⁵⁴

¹⁵³ Wawancara dengan Ahmad Porang, nelayan. Bungus, 12 Februari 2013 jam 01.00

¹⁵⁴ Wawancara dengan Nasril, buruh, Bungus Timur, 14 Februari 2013. Jam 11.5

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Jasman berusia 47 tahun bekerja sebagai wiraswasta

“Pilpres 2009 saya tidak ikut memilih, karena ada masalah sebelum Pilpres 2009 pada waktu itu saya menjadi anggota DPC ada hal yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, karena itu saya keluar dari anggota DPC PAN, saya menganggap semua partai sama saja lebih baik saya tidak ikut memilih, pada waktu itu saya ada ditempat dan saya pergi ke kedai Kopi. Pilpres 2004 yang lalu saya ikut memilih saya memilih PAN, untuk Pilpres 2014 nanti saya tidak ikut karena saya tidak punya keinginan lagi untuk Pemilu”.¹⁵⁵

B. Faktor Penyebab Tingginya Persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009

1. Faktor Politis

Golput politis, yakni mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa Pilpres/Pileg/Pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.¹⁵⁶ Berdasarkan hasil penelitian dilapangan banyak informan yang Golput karena faktor politis dari empat klasifikasi Golput yang terdapat di Kota Padang, Golput politis adalah alasan yang paling banyak ditemukan dilapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh informan M. Scyahbana Syam, sebagai devisi perencanaan teknis KPU Kota Padang.

”Kalau dilihat fenomena Golput secara umum itu karena kesadaran nya sendiri dia tidak menggunakan hak pilih tapi ada juga pemilih yang Golput karna tidak terdaftar. Untuk Kota Padang berdasarkan evaluasi baik Pileg maupun Pilpres itu menunjukkan faktor kesadaran lebih banyak, bukan pada faktor teknis. Faktor kesadaran ini disebabkan karena banyak visi misi calon presiden menurut analisa

¹⁵⁵ Wawancara dengan Jasman, wiraswasta, Bungus, 14 Februari 2013. Jam 11.00

¹⁵⁶ [Pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/golput dan pemilihan 2009.pdf](http://Pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/golput%20dan%20pemilihan%202009.pdf), diakses 16 Februari 2013

mereka hanya bisa memberikan harapan bagi mereka tanpa adanya bukti-bukti.¹⁵⁷

Sebagaimana diungkapkan oleh Refrianto ST berusia 38 tahun bekerja sebagai dosen

“Pemilu 2009 yang lalu saya tidak ikut memilih karena tidak ada calon yang saya sukai pada Pilpres 2009 itu. Calon yang saya inginkan itu Islam, merakyat, jujur, transparan, tidak hanya mengumbar janji. Saya berada ditempat pada waktu diadakan Pilpres 2009 tersebut, akan tetapi saya malas ikut memilih”.¹⁵⁸

2. Faktor Teknis

Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.¹⁵⁹ Di Kecamatan Padang Barat Golput teknis lebih banyak dari pada Golput politis dan Golput teknis politis (administratif). Sebagaimana diungkapkan oleh Riyan berusia 21 tahun sebagai mahasiswa.

“Saya tidak ikut memilih pada Pilpres 2009 karena pada waktu itu saya pergi studi banding Ke Jakarta. Pada Pilpres 2004 saya tidak ikut memilih karena umur saya belum cukup 17 tahun, Pilpres 2009 itu adalah Pilpres pertama kali bagi saya tetapi saya tidak ikut karena saya lagi di Jakarta. Untuk Pilpres 2014 kemungkinan ikut kalau tidak ada halangan dan rintangan”.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Wawancara dengan M. Scyabhana Syam, Devisi Perencanaan Teknis, Jln Ahmad Dahlan No 5 jam 11

¹⁵⁸ Wawancara dengan Refrianto, Dosen, Kel. Koto Pulai. 20 Januari jam 04.00

¹⁵⁹ Bismar Arianto. 2011. “Analisis Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu”. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan....., hal. 54

¹⁶⁰ Wawancara dengan Riyan, mahasiswa, jln Karet No 8 Padang. Kel. Padang Pasir. 19 Februari 2013 jam 4.00

3. Faktor Sosial Ekonomi

Lebih memilih bekerja dibanding datang ke TPS, terutama dikalangan pekerja yang memperoleh upah secara harian.¹⁶¹ Berdasarkan hasil penelitian dilapangan banyak ditemukan informan tersebut lebih mementingkan pekerjaan daripada untuk memilih. Menurut Ir. Indra Purnama sebagai aktivis partai Demokrat menjelaskan faktor penyebab tingginya Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 adalah

“Tingginya angka Golput di Kota Padang disebabkan oleh sosialisainya kurang dalam artian sosialisasi tentang hak suara, yang kedua karena ekonomi yaitu masalah pekerjaan, karena di daerah ini kebanyakan sebagai pedagang dan sebagai nelayan. Kalau sekiranya pas waktu Pemilu diberikan uang sesuai dengan gaji sebanyak satu hari, pasti orang akan ikut memilih. Yang ketiga pada waktu Pemilu jangan pada hari libur”.¹⁶²

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Yopi Patra berusia 25 tahun bekerja sebagai tukang ojek.

“Saya tidak ikut memilih pada Pilpres 2009 karena kalau saya ikut bagaimana dengan pekerjaan saya, ikut memilihpun tidak dikasih uang, nanti saya antri sedangkan saya mau mengojek orang, rugi yang saya dapatkan, kalau gaji saya sebagai tukang ojek dibayar pas waktu mencoblos, saya tidak akan mengojek pas hari Pemilu itu, dan saya akan ikut Pemilu, biar ajalah siapa yang menang untungnya juga tidak ada sama saya.”¹⁶³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Martina berusia 50 tahun bekerja sebagai pedagang

“Saya tidak ikut memilih pada pemilihan Presiden 2009 karena Presiden itu hanya banyak menggumbar janji, anak saya sudah

¹⁶¹ Pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/Golput dan pemilihan 2009.pdf, diakses 16 Februari 2013

¹⁶² Wawancara dengan Ir. Indra Purnama sebagai aktivis partai Demokrat, Parak Anau Raya No.3. 25 Januari 2013 jam 05.30

¹⁶³ Wawancara dengan Yopi Patra, tukang ojek, Parupuk Tabing. 13 Februari 2013. Jam 4.00

sekolah tinggi tapi mencari pekerjaan juga susah. Seharusnya Presiden itu memperhatikan nasib rakyatnya bukan hanya memperkaya dirinya sendiri. Lebih baik saya berdagang daripada ikut memilih. Terkadang kita antri untuk mencoblos. Lebih baik saya tidak ikut dari pada buang-buang waktu.¹⁶⁴

C. Akibat Tingginya Persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 bagi Demokrasi

Tindakan Golput dalam jangka pendek memang sia-sia karena tidak mengubah apapun, namun dalam jangka panjang justru menjadi bagian penting dari pendidikan politik menuju ke tingkat kematangan berpolitik dan berdemokrasi. Golput adalah salah satu instrumen gerakan moral rakyat yang dilakukan dengan cara mengekspresikan ekspresinya dengan tidak berekspresi.¹⁶⁵

Fenomena Golput yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor kekecewaan publik terhadap kinerja partai politik dan pemerintah yang belum efektif, maka menjadi pembelajaran bagi partai politik dan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai mesin kerja demokrasi yang efektif dan memiliki komitmen yang kuat, mewujudkan *good public governance*. Ketidakmampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja tersebut, maka fenomena Golput akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*political decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pebangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut

¹⁶⁴ Wawancara dengan Martina, pedagang, Parupuk Tabing 01 Februari 2013. Jam 04.00

¹⁶⁵ <http://www.lanskap-artikel.blogspot.com/2008/10/memahami-eksistensi-golput-dalam-berdemokrasi>, diakses 20 Mei 2012.

bertanggungjawab.¹⁶⁶ Sebagaimana diungkapkan oleh informan Asrinaldi sebagai

Ahli politik

“Dampak dari tingginya persentase Golput di Kota Padang, dampak politiknya adalah legitimasi akan berkurang bagi fungsi-fungsi negara itu kurang kalau hanya 50% yang hanya memberi suara dan itu untuk beberapa calon misal Golkar hanya 20% dan 30% lagi orang tidak percaya kepada partai artinya legitimasinya rendah. Dampaknya terhadap demokrasi tidak ada demokrasi sebagai bagian dari pendemokrasian tidak ada masalah, Golput itu adalah pilihan mereka, demokrasi tidak masalah ada suka atau tidak, ketidaksukaan seseorang terhadap sesuatu itu dihargai. Idealnya kalau demokrasi ini kan banyak bagiannya ada demokrasi secara possibal, kalau seandainya yang lebih banyak pula yang Golput daripada yang berpartisipasi berarti demokrasinya tidak berjalan dengan baik, akumulasi demokrasi itu siapa yang terbanyak dia yang menang”¹⁶⁷

Hal senada juga di jelaskan oleh informan Hari Efendi Iskandar sebagai

aktivis sosial politik

“Semakin tinggi tingkat partisipasi politik semakin lebih baik legitimasi, legitimasi kekuasaan akan lebih kuat kalau partisipasi pemilih tinggi kalau partisipasi pemilih rendah ini menjadi PR bersama para elit politik, seharusnya orangkan harus berpartisipasi aktif”.¹⁶⁸

Dalam *maindset* Golput, demokrasi di Indonesia saat ini lebih dimaknai oleh publik, yaitu baru sebatas kebebasan untuk mengkritik Pemerintah dan mengganti pemerintahan melalui Pemilu secara reguler, dan belum menyentuh substansi pembangunan demokrasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Fenomena tersebut, kiranya perlu mendapatkan apresiasi dan solusi oleh para aktor-aktor pemerintahan (penyelenggara negara) menghadapi Pemilu di tahun

¹⁶⁶ Soebagio. 2008. “Implikasi Golongan Putih.....”, hal. 85

¹⁶⁷ Wawancara dengan Dr. Asrinaldi, Ahli Politik, Kampus UNAND Limau Manis, 21 Februari 2013 jam 01. 20

¹⁶⁸ Wawancara dengan Hari Efendi Iskandar, SS, MA, Sebagai Aktivis Sosial Politik, Kampus UNAND Limau Manis, 9 Februari 2013

berikutnya agar pesta demokrasi lebih efisien dan berkualitas secara sistemik, baik dalam tataran *input*, *process*, dan *output*, dan malah bukan bersifat kontra produktif dalam berdemokrasi. Dalam arti proses demokrasi malah menurunkan tingkat partisipasi politik pemilih di satu sisi, dan di sisi lain malah makin meningkatnya jumlah Golput yang berimplikasi negatif bagi pembangunan kualitas demokrasi. Golput yang eskalatif dan signifikan secara potensial merupakan ancaman bagi proses demokratisasi, yang jika tidak mampu diatasi dengan kinerja Pemerintah yang amanah berbasis *good public government* dan keteladanan sikap serta perilaku yang bermartabat, dapat berimplikasi negatif melumpuhkan demokrasi.¹⁶⁹

Kekhawatiran pemerintah terhadap masalah Golput pada masa Orde Baru dengan menggunakan agamawan untuk berfatwa akan pentingnya menggunakan hak pilih pada saat Pemilu. Di akhir masa pemerintahan Orba misalnya, menjelang Pemilu 1997, MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia), dan Walubi, mengeluarkan fatwa pada ummatnya masing-masing agar para pemilih menggunakan hak suaranya pada Pemilu 1997.¹⁷⁰

Awal Desember 2008 atau menjelang memasuki tahun Pemilu 2009, isu tentang Golput mulai disoroti kembali dengan menambahkan ide tentang fatwa haram. Menurut ketua MUI pusat bidang fatwa, KH. Ma'ruf Amin, MUI tidak mengeluarkan fatwa tanpa pertimbangan. Tetapi dari desakan masyarakat yang

¹⁶⁹ Soebagio. 2008. "Implikasi Golongan Putih....., hal. 85

¹⁷⁰ Sri Yanuarti "Golput dan Pemilu"....., hal.27

meminta *guidelines*, dan resah atas wacana Golput yang berkembang. Mengingat masalah Pemilu sangat krusial, maka putusannya tidak diambil di komisi fatwa tetapi melibatkan 700 ulama seluruh Indonesia dari semua kelompok/golongan, yaitu dalam Ijma' Ulama.¹⁷¹

Golput dipandang sebagai kegagalan proses demokrasi. Golput dalam arti demokrasi tidak rusak dan juga tidak diperbaiki dengan adanya Golput. Artinya, keberadaan Golput adalah fenomena tawar menawar harga demokrasi dan ini merupakan bagian dari hak politik. Contoh, keberadaan Golput dipakai sebagai tekanan untuk memunculkan peraturan calon independen baik Gubernur/Bupati/Wali Kota/Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Koalisi pemilih, Golput dan parpol membuat semua kepentingan menjadi senang. Negosiasi, kerumunan pendapatan, kontrak politik menjadi semakin dekat, seperti yang dilihat dan dengar di radio, surat kabar dan TV. Hal ini sudah memunculkan komunikasi politik.¹⁷²

Demokrasi tidak melegalkan seseorang untuk tidak memilih, melainkan membebaskan orang untuk menentukan pilihannya. Golput yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindakan pembakangan sipil (*civil of dissident*) mengindikasikan surutnya kepercayaan masyarakat kepada negara, yang berarti bertentangan dengan semangat demokrasi. Fenomena ini terjadi sebagai akibat dari *democracy error*, yakni pertumbuhan demokratisasi yang tidak seimbang dalam

¹⁷¹Muhaimin, *Golput dalam Optik Kaum Santri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 42-52

¹⁷²Nyoman Subanda. 2009. Analisis Kritis terhadap Fenomena Golput dalam Pemilu. "*Jurnal Konstitusi*", (Online), Vol. 11, No. 1, (<http://paparisa.unpatti.ac.id/paperepo/ppr-iteminfo ink.ph>, diakses 25 Juli 2012).

berbagai bidang, sehingga mengiring masyarakat bertindak antipati terhadap aktivitas politik dan agenda demokrasi. Demokratisasi di bidang politik sangat pesat berkembang, tapi gagal membawa kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Demokrasi direduksi menjadi ajang kompetisi perebutan kekuasaan, bukan pencapaian kesejahteraan bersama.¹⁷³

Golput menjadi sebuah sikap yang niscaya ketika Pemilu tidak lagi membawa perbaikan nyata bagi kehidupan nyata. Golput bukanlah sebuah bentuk pengingkaran terhadap demokrasi, justru Golput pada prinsipnya merupakan bagian integral dari efektifitas demokrasi itu sendiri. Malah akan sangat diragukan jika dalam setiap pagelaran pesta demokrasi tidak terdapat pemilih yang memilih Golput.¹⁷⁴

Tingginya angka Golput pada masa reformasi di banding pada masa Orde Baru disebabkan karena pada masa reformasi sistem Pemilu lebih demokratis dan tidak ada paksaan untuk memilih dan tidak ada kewajiban untuk memilih partai seperti pada Pemilu di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru orang tidak boleh Golput siapa yang Golput akan dikenai sanksi

¹⁷³ Pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/golput dan pemilihan 2009. Pdf, diakses 22 Januari 2013.

¹⁷⁴ Muhaimin, *Golput dalam Optik*, hal. 42

BAB VI

PEMBAHASAN

1. Proses Memilih Menjadi Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009

Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilprespun dimasukkan ke dalam rezim Pemilu. Pilpres sebagai bagian dari Pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.

Pilpres 2004 diadakan dua kali putaran karena masing-masing calon belum memenuhi ketentuan persentase yang telah ditetapkan. Menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, untuk dapat terpilih menjadi Presiden, kandidat harus memperoleh minimal 50 persen dari jumlah suara sah dan mendapatkan minimal 20 persen suara di sepertiga Provinsi yang ada di Indonesia pada putaran pertama. Apabila tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan tersebut, maka diadakan pemilihan putaran kedua, dimana kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi presiden.

Partisipasi memilih (*voting turn-out*) Presiden pada Pilpres 2004 di Kota Padang pada putaran pertama sebesar 72,23% dan putaran kedua partisipasi masyarakat hanya 66,39%. Pada putaran pertama pemilihan presiden 2004 ini ada lima kandidat yang bertarung. *Pertama* H. Wiranto, SH dan wakilnya Ir. H. Salahuddin Wahid. *Kedua* Hj. Megawati Soekarno Putri dan wakilnya KH. A. Hasyim Muzadi. *Ketiga* Prof. DR. H. M. Amien Rais dan wakilnya DR. Ir. H.

Siswono Yudo Husodo. *Keempat* H. Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. *Kelima* DR. H. Hamzah Haz dan wakilnya H. Agung Gumelar, MSc.

Kandidat yang berhasil masuk kedalam putaran kedua dari lima kandidat tersebut adalah, Hj. Megawati Soekarno Putri wakilnya KH. A. Hasyim Muzadi dan H. Susilo Bambang Yudhoyono wakilnya Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla berhasil masuk dalam putaran kedua pemilihan Presiden, dalam pertarungan tersebut pemenangnya adalah H. Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Artinya partisipasi pemilih pada Pilpres putaran kedua lebih rendah dari pada partisipasi Pilpres putaran pertama karena berdasarkan hasil wawancara pemilih yang mendukung kandidat yang kalah di putaran pertama ada sebagian yang tidak ikut memilih Pilpres pada putaran kedua karena kandidatnya tidak masuk pada putaran kedua dan sebagian yang lain ada yang ikut memilih kandidat yang masuk pada putaran kedua pada Pilpres 2004 walaupun kandidat yang diinginkan tidak masuk pada putaran kedua.

Sementara pada Pilpres 2009 partisipasi masyarakat Kota Padang hanya 70,8%. Pada Pilpres 2009 ini ada tiga kandidat. *Pertama*, Hj. Megawati Soekarno Putri dan wakilnya H. Prabowo Subianto. *Kedua*, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Prof. DR. Boediono. *Ketiga*, H. M. Jusuf Kalla dan wakilnya H. Wiranto. Pada Pilpres 2009 ini ada tiga bentuk-bentuk Golput di Kota Padang yaitu Golput teknis, teknis politis dan Golput politik, diantara tiga bentuk-bentuk Golput tersebut Golput politik yang paling banyak. Untuk lebih jelasnya proses pemilih menjadi Golput pada Pilpres 2009 di Kota Padang dapat

dilihat dari tiga kecamatan. *Pertama*, di Kecamatan Padang Barat persentase tidak memilihnya 33,6% dan suara tidak sah 2,5%. *Kedua*, di Kecamatan Koto Tangah persentase tidak memilih 31,4% dan jumlah suara tidak sah 2,09%. *Ketiga*, di Kecamatan Bungus Teluk Kabung persentase tidak memilih 24,5% dan suara tidak sah 3,7%.

a. Proses Pemilih menjadi Golput di Kecamatan Padang Barat

Pada Pilpres 2004 Berdasarkan hasil wawancara dari informan mengatakan bahwa, informan ikut memilih pada putaran pertama, dan informan memilih partai seperti partai Demokrat, PAN, Golkar, PKS, PDI, PPP. Pada Pilpres 2004 putaran kedua pemilih berdasarkan wawancara ada yang tidak ikut memilih karena calon yang mereka sukai kalah, dan mengambil keputusan tidak ikut memilih, mereka tidak memilih karena faktor dari diri sendiri bukan diajak oleh orang lain. Pada Pilpres 2009 kebanyakan informan tidak ikut memilih ada yang karena alasan teknis dan ada yang karena alasan teknis politis dan ada yang karena alasan politis. Dari masing-masing informan kebanyakan informan tidak memilih karena alasan politis yang kecewa terhadap pemimpin yang tidak membawa perubahan dalam kehidupan mereka, dan juga kecewa terhadap janji-janji yang tidak terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan ada tiga penjelasan tentang Golput. *Pertama*, Golput itu adalah orang-orang yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap dan dia tidak datang ke TPS karena kesadarannya

untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan yang kedua adalah orang yang terdaftar dan dia datang ke TPS akan tetapi dia menggunakan hak pilihnya dengan kesadarannya secara tidak benar atau merusaknya. Hal kedua tersebut dikatakan Golput karena kesadaran politiknya yang membuat seseorang kecewa dengan Pemilu. Misalnya pada hari H Ani sudah punya keinginan untuk ikut memilih akan tetapi pada hari H tersebut anaknya sakit dan dia pergi mengantar anaknya pergi berobat dan akhirnya dia tidak ikut memilih, hal tersebut bukan Golput, karena dia sudah punya keinginan untuk memilih, akan tetapi kalau seandainya pada hari H Ani sudah punya keinginan untuk tidak memilih karena alasannya, Pemilu itu tidak bermanfaat itu artinya dia Golput. Orang tua yang salah coblos karena tidak tau tata cara mencoblos sementara dia punya keinginan untuk memilih, itu juga bukan Golput. Pada umumnya orang mengeneralisasikan Golput itu adalah orang yang tidak datang ke TPS. Mengeneralisasikan Golput itu salah, akan tetapi kalau Golput itu di klasifikasikan tidak apa-apa, misalnya sekian persen Golput politik, sekian persen Golput teknis dan lain-lain.

Kedua, Golput dalam arti sesungguhnya sesuai dengan konsep-konsep dan pemahaman teoritis. Mungkin kalangan menengah atau kalangan terdidik bisa jadi dia profesional, akademisi, dan pengusaha dengan alasan rasional atau ketidakpercayaan kepada partai politik. Tapi di basis akar rumput mereka bukan Golput, mereka tidak memilih itu karena alasan teknis. Karena faktor tingginya angka Golput pada Pemilu 2009 itu karena masalah DPT. Artinya karena faktor teknis tidak terdaftar atau kesibukan aktivitas ekonomi. Orang yang Golput itu

adalah orang yang punya kesadaran, mereka tidak percaya kepada perilaku elit politik dan partai politik.

Ketiga, Golput itu tidak datang ke TPS dan tidak ikut memilih. Golput itu sebenarnya sudah mengambil keputusan untuk tidak datang KTPS, dan sudah berpartisipasi kepada untuk tidak ikut memilih. Ada bermacam-macam alasan seperti sibuk dan tidak percaya kepada penyelenggara. Ada juga kaum intelektual yang Golput karena merasa malu datang KTPS bergabung dengan orang-orang miskin dan merasa terhina untuk datang KTPS itu artinya dia tidak mengerti dengan hak politik.

Teori menjelaskan bahwa dalam tahapan demokrasi elektoral atau demokrasi prosedural, Golput adalah manifestasi politik, dimana rakyat tidak berpartisipasi politik (menggunakan hak pilihnya) secara sukarela dalam pemilihan umum sebagai pesta demokrasi. Golput sebagai fenomena politik di Indonesia, juga ikut berkembang bersama dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Golput sebagai fenomena politik di Indonesia, juga ikut berkembang bersama dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia Golput dapat merujuk kepada seseorang, kelompok, gerakan, sikap, tindakan, atau perilaku. Mereka yang tinggal jauh dari tempat pemungutan suara tidak menggunakan hak pilihnya adalah Golput. Artinya Golput itu bukan saja orang yang tidak ikut memilih orang yang ikut memilih juga dikatakan Golput apabila orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya secara tidak benar dengan unsure kesadarannya.

Menurut Arbi Sanit Sikap orang-orang Golput, dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum Golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. *Pertama*, menusuk lebih dari satu gambar partai. *Kedua*, menusuk bagian putih dari kartu suara. *Ketiga*, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan yang ikut memilih pada Pilpres 2009, ada tiga informan yang ikut memilih akan tetapi mereka tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan unsur kesadarannya, ada yang mencoblos dua gambar partai, dan ada yang mencoblos tidak pada tempatnya. Alasan mereka mencoblos secara tidak benar karena bawasanya dia sengaja mencoblos secara tidak benar karena mereka kecewa terhadap pemimpin yang tidak membawa perubahan kearah yang lebih baik.

Menurut Eep Saefulloh Fatah ada empat bentuk-bentuk yaitu Golput teknis, Golput teknis politis, Golput politis dan Golput idiologis akan tetapi di Kecamatan Padang Barat bentuk-bentuk Golput tersebut hanya ada tiga yaitu Golput teknis, Golput teknis politis dan Golput politis. Golput idiologis tidak terdapat di kecamatan ini karena berdasarkan hasil wawancara informan menyukai sistim demokrasi, mereka bukan menyalahkan sistim akan tetapi mereka kecewa dengan Presiden yang tidak membawa perubahan kearah yang lebih baik dan hanya mengumbar janji-janji. Golput ideologis, yakni mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi dan tidak mau terlibat di dalamnya, entah karena

alasan fundamentalisme agama hal ini tidak ada ditemukan. Kebanyakan informan Golput politis. Kecamatan Padang Barat persentase tidak memilihnya 33, 6% dan suara tidak sah 2,5%.

b. Proses Memilih menjadi Golput di Kecamatan Koto Tangah

Kebanyakan informan ikut memilih pada putaran pertama Pilpres 2004 dan ada yang memilih partai Demokrat, PKS, Golkar, PAN. Pada putaran kedua informan ada yang tidak ikut memilih karena partai yang disukainya tidak masuk pada putaran kedua seperti informan yang menyukai partai PKS, karena partainya kalah, oleh sebab itu informan mengambil keputusan untuk tidak memilih pada Pilpres 2004 pada putaran kedua. Pada pilpres 2009 masyarakat Koto Tangah banyak yang tidak ikut memilih pada Pilpres 2009, mereka bukan saja berasal dari pendidikan rendah orang yang berpendidikan tinggi juga banyak yang tidak ikut memilih.

Persentase tidak memilih di Kecamatan Koto Tangah pada Pilpres 2009 adalah sebesar 31,4% dan jumlah suara tidak sah 2,09%. Berdasarkan hasil penelitian Aina persentase tidak memilih pada Pemilukada di Kecamatan Koto Tangah adalah sebesar 43,20%. Berdasarkan hasil wawancara Partisipasi masyarakat pada Pemilukada khususnya di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto tinggi hampir semuanya ikut memilih karena Fauzi Bahar berasal dari daerah mereka. Informan juga mengatakan jika calon Presiden berasal dari daerahnya maka informan itu akan ikut memilih. Kecamatan Koto Tangah termasuk kedalam kategori wilayah semi pinggiran karena daerahnya tidak terlalu jauh dari pusat

kota. Bentuk-bentuk Golput di Kecamatan ini adalah Golput politis, Golput teknis, dan Golput teknis politis. Golput yang paling banyak adalah Golput politis.

c. Proses Pemilih menjadi Golput di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Sebelum Pilpres 2009, Pilpres secara langsung juga sudah dilaksanakan pada Pilpres 2004. Kebanyakan informan ikut memilih baik pada putaran pertama maupun pada putaran kedua. Pada Pilpres 2009 persentase tidak memilih masyarakat Bungus Teluk Kabung 24,5% dan suara tidak sah 3,7%. Berdasarkan hasil wawancara informan tidak ikut memilih berpendidikan rendah (tamat SD), alasannya tidak memilih karena informan kecewa terhadap pemerintah. Kekecewaan ini disebabkan karena pada tahun 2005 PT Sengkeong (PT Papan Triplek ditutup habis oleh pemerintah) dimana informan bekerja sebagai buruh di PT tersebut tidak punya pekerjaan lagi dan juga karyawannya banyak. Untuk Pilpres 2014 nanti informan akan ikut memilih kalau seandainya PT Papan Triplek ini dihidupkan kembali. Kami sudah melaporkan kepada pemerintah Kota Padang tapi tidak ada ditanggapi sama sekali. Alasan pemerintah menutup PT ini karena PT tersebut mengalami kerugian, modal yang dikeluarkan oleh PT tersebut sangat besar.

Alasan yang kedua karena faktor kekecewaan terhadap partai, Berdasarkan hasil wawancara dari informan tidak memilih pada Pilpres 2009 karena pada Pemilu 2004 informan di tunjuk sebagai anggota DPC PAN (Dewan Pimpinan Cabang) pada saat itu ada ketentuan-ketentuan di PAN yang

bertentangan dengan hati nuraninya, sampai keluar dari anggota DPC PAN oleh karena itu pada Pilpres 2009 dia tidak ikut memilih karena menurutnya semua partai itu sama saja apapun yang akan menang atau siapapun yang akan menjabat sebagai Presiden itu sama saja. Golput yang paling banyak di kecamatan ini adalah Golput Politis karena walaupun pendidikannya rendah akan tetapi alasannya merupakan faktor kekecewaan terhadap pemimpin, itu dikatakan Golput politis karena alasannya rasional. Informan sengaja untuk tidak memilih karena faktor kekecewaan

Partisipasi politik dalam masyarakat primitif, dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakannya dengan kegiatan lain. Akan tetapi dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkatan melek huruf dan masalah umum dari komunikasi. Berlawanan dengan hal ini ialah partisipasi politik dalam masyarakat totaliter adalah bahwa mereka berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan. Taraf variasi yang paling besar kiranya terdapat dalam negara demokrasi modern, yang biasanya mendorong adanya partisipasi dengan berbagai cara, pada umumnya justru memberikan partisipasi tersebut menemukan tingkatannya sendiri. Akan tetapi Bungus Teluk Kabung juga jauh dari pusat kota tetapi persentase tidak memilihnya juga tinggi.

2. Faktor Penyebab Tingginya Persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009

Moon menjelaskan ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, yaitu faktor psikologis, sistem politik, kepercayaan politik, dan latar belakang sosial ekonomi.

a. Faktor Psikologis

Pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori *pertama* berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Bahwasanya perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Orang yang memiliki kepribadian tidak toleran dan tak acuh cenderung untuk tidak memilih. *Kedua*, berkaitan dengan orientasi kepribadian, bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh orientasi perilaku pemilih yang secara koseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepribadian pemilih menjadi Golput bukan tidak toleran akan tetapi informan mempunyai kepribadian yang toleran.

b. Faktor Sistim Politik

Teori yang dapat menjelaskan kaitan antara kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dengan sistim politik yang dikemukakan oleh Tingsten dalam salah satu studinya menjelaskan bahwa ada hubungan antara sistim Pemilu atau sistem

perwakilan yang diterapkan sangat berpengaruh pada persentase kehadiran dan ketidakhadiran seseorang dalam bilik suara. Hasil studi yang dilakukan Tingsten menyimpulkan bahwa, di negara-negara yang menerapkan sistem Pemilu atau sistem perwakilan berimbang (proporsional) seperti negara-negara Eropa Barat, rata-rata partisipasi pemilih cukup tinggi. Sementara Negara-negara yang menerapkan sistem distrik, jumlah kehadiran pemilih relatif rendah.

Berdasarkan hasil penelitian sistem perwakilan berimbang (proporsional) partisipasinya lebih rendah dari pada sistem distrik. Di Kota Padang pada masa Orde Baru terlihat partisipasi masyarakat cukup tinggi yaitu berkisar antara 80-90%. Tetapi pada Pemilu legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi tersebut merosot, hanya 74,41% dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) pada putaran pertama sebesar 72,23% dan putaran kedua partisipasi masyarakat hanya 71,39%. Sementara pada Pilpres 2009 partisipasi masyarakat Kota Padang hanya 70,8%. Hal ini dikarenakan, dalam sistem perwakilan berimbang, perolehan kursi sangat tergantung pada proporsi jumlah suara pemilih. Sementara itu, dalam sistem distrik perolehan kursi sangat ditentukan oleh mayoritas suara yang diperoleh. Walaupun sistem proporsional dilaksanakan di Indonesia akan tetapi Partisipasi memilih masyarakat rendah. Bahkan partisipasi di Kota Padang lebih rendah dari pada di tingkat nasional.

c. Faktor Kepercayaan Politik

Berdasarkan hasil penelitian kepercayaan politik masyarakat Kota Padang rendah, dimana menurut mereka politik tidak bisa merubah keadaan kearah yang lebih baik. Penggunaan variabel kepercayaan dan ketidakpercayaan

politik untuk menjelaskan perilaku politik *non-voting*, tentang keaktifan atau ketidakaktifan seseorang dalam kegiatan politik. Ketidakaktifan dalam konsep ketidakpercayaan politik sendiri selalu mengandung pengertian ganda. *Pertama*, Ketidakaktifan dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik. *Kedua*, Ketidakaktifan dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi kepercayaan yang tinggi, di mana Ketidakaktifan seseorang dalam bilik suara menandakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada, atau tidak khawatir dengan keadaan politik yang ada.

d. Faktor Latar Belakang Sosial Ekonomi

Setidaknya ada tiga indikator yang biasa digunakan untuk menjelaskan status sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Wolfinger seperti yang dijelaskan M. Asfar menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. *Pertama*, tingkat kemampuan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, di samping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan.

Kedua pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam Pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiun misalnya,

menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding yang lain. Sebab para pegawai negeri ini sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah seperti kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. *Ketiga*, pendapatan tinggi memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses Pemilu. Tapi kenyataannya tidak selalu PNS ikut memilih karena tidak memilih juga merupakan hak, dan juga termasuk kepada bentuk partisipasi, bentuk pemerintahan demokrasi tidak memaksa seseorang untuk memilih .

Pendidikan tinggi cenderung aktif berpolitik, sebaliknya masyarakat berpendidikan rendah cenderung pasif. Tapi pada kenyataannya pada Pilpres 2009 yang berlangsung di Kota Padang, orang berpendidikan tinggi banyak yang Golput. Hubungan tingkat pendidikan dengan kehadiran memilih memang menunjukkan hubungan yang erat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin luas pengetahuan dan akses informasi yang dimiliki, maka memungkinkan seseorang bersifat kritis. Mereka juga mengetahui praktek-praktek politik dan ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan prinsi-prinsip keadilan, kejujuran, kebebasan dan demokrasi. Pengetahuan semacam inilah yang pada akhirnya berpengaruh pada keputusan untuk tidak memilih.

Pendidikan yang tinggi memberikan respon yang kreatif terhadap beberapa fenomena politik yang muncul di tengah kehidupan masyarakat ketimbang masyarakat yang tidak terlalu baik tingkat pendidikannya. Dalam konteks demikian, pendidikan berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Selain tingkat pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama dan

keadaan ekonomi, turut mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih pada saat Pemilu. Artinya keadaan ekonomi, agama dan kelas sosial pemilih dapat menjadi alasan Golput. Selama ini, ekonomi rendah, pekerja yang penghasilannya pas-pasan, cenderung tidak hadir ke tempat pemungutan suara dengan pertimbangan hari-hari mereka lebih dipentingkan mencari nafkah. Bagi kelompok ini, Golput bukan persoalan berani atau tidak berani menampilkan kelainan sikap politik, namun semata-mata faktor kebutuhan yang terlampaui besar bila dibandingkan dengan kebutuhan politik.

Golput di era reformasi, tak selalu berasal dari ekonomi rendah, kalangan borjuis pun juga ambil bagian. Penghasilan yang cukup atau bahkan lebih dari sekedar cukup tak menjamin berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Kalangan borjuis tidak terlalu peduli dengan politik, kecuali terdapat suatu kepentingan tertentu. Karena itu, waktu bagi mereka difungsikan untuk bekerja dan istirahat di hari libur seperti Pemilu. Fenomena ini menunjukkan tidak adanya motivasi yang diakibatkan dari fenomena politik yang membosankan.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah “binatang politik”. Politik adalah ungkapan kemampuan rasionalitas manusia. Oleh karena itu arti pentingnya pengambilan keputusan rasional bagi partisipasi politik, seorang pemberi suara yang bijaksana akan menilai kandidat secara rasional sebelum mereka memberikan suara.

Menurut Jacob Wadu tingginya angka Golput tidak semata-mata karena sikap apatis masyarakat terhadap Pemilu, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, berkurangnya proses pendaftaran pemilih. *Kedua*, metode pendaftaran

pemilih dengan sistem daftar pemilih aktif, dimana masyarakat sendiri yang aktif bertanya dan mendaftarkan diri sebagai pemilih, dan petugas bersifat pasif (menunggu). *Ketiga*, kurangnya sosialisasi KPU tentang pendaftaran pemilih. *Keempat*, singkatnya masa perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) hanya satu minggu. *Kelima*, kinerja (*performenco*) partai politik dinilai buruk.

Tingginya angka Golput yang terjadi pada Pemilu 2009 lebih banyak disebabkan lemahnya kinerja penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dalam menyusun DPT. Menurut Sri Moertiningsih Adhioetomo, setidaknya ada beberapa faktor yang mengakibatkan carut marutnya penyusunan DPT: *Pertama*, UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang diikuti PP No. 37/2007 mewajibkan penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan, yakni pindah, datang, perubahan alamat dan tempat tinggal, serta perubahan status kependudukan dari tempat tinggal sementara menjadi tempat tinggal tetap dengan jangka waktu satu tahun. Ini membawa akibat terhadap penerbitan kartu keluarga, kartu penduduk dan lain-lain. Ini sistem *de jure*. *Kedua* mobilitas penduduk yang makin tinggi tidak disertai dengan kesadaran melaporkan peristiwa pindah, datang, serta perubahan alamat dan tempat tinggal, seperti yang diwajibkan UU. Penduduk enggan mengganti KTP ditempat tinggal asal dengan sejumlah alasan dan belum terdaftar ditempat tinggal baru. Kalau asas *de jure* diterapkan (dengan diterbitkannya KTP) dia akan kehilangan hak memilih di tempat tinggal baru untuk dapat memilih dia harus kembali ketempat asalnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Padang tingginya angka Golput pada Pilpres 2009 bukan disebabkan faktor administratif dalam artian lemahnya

kinerja penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dalam menyusun DPT. Sebagaimana diungkapkan oleh informan M. Scyahbana Syam, sebagai devisi perencanaan teknis KPU Kota Padang.

“Jarak antara Pileg dengan dengan Pilpres tidak terlalu jauh, tapi penambahan DPT cukup signifikan ini menunjukkan bahwa memang dari sisi penambahan DPT tidak ada persoalan. Penyusunan DPT di Kota Padang mengacu kepada Undang-undang, diawali dari data pemilih Pemilu terakhir yaitu DPT Pileg kemudian dimutakhirkan untuk DPT Pilpres. dari proses yang dilakukan ternyata DPT Pilpres dibandingkan dengan DPT Pileg sangat jauh sekali perbedaannya DPT Pileg yaitu 548.014 sedangkan DPT Pilpres 571.069. Itu artinya ada kenaikan, dengan kenaikan ini tentu saja DPT Pilpres menyempurnakan DPT Pileg ketika itu masih banyak persoalan DPT tdk terdaftar di Pileg bahkan penghuni Napi juga dimasukkan kecuali mereka sudah bebas pd saat itu, persoalan DPT Pilpres tidak ada masalah bahwa masih ada dilapangan tidak ada dapat undangan (C6) undangan itu tidak sarat mutlak DPT akan tetapi saratnya adalah warga negara Indonesia yang berada di Kota Padang sepanjang namanya sudah terdaftar di DPT dia sudah bisa memilih walupun undangan tidak ada, undangan itu gunanya untuk memberitahukan bahwasanya pada hari itu Pemilu. Ada dua hal kenapa seseorang tersebut tidak dapat undangan, yang pertama ketika petugas datang ke rumah dia tidak ada dirumah dan undangan itu ditahan kalau pemilih tidak ada dirumah undangan itu ditahan oleh petugas. Undangan itu gunanya untuk memberitahukan bahwasanya pada hari itu Pemilu pada hari libur kebanyakan mahasiswa bukan karena faktor C6 itu, kapasitas KPU hanya mensosialisasikan seluruh tahapan. Meakomodir seluruh warganegara. KTP, Paspor dibolehkan sepanjang terdaftar di DPT waktu yang digunakan untuk Pilpres hanya satu bulan karena penyempurnaan dari DPT Pileg. Untuk pemuktahiran DPT Pilpres digunakan media dan mobil keliling kelurah-lurah”.¹⁷⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh informan Jafrinal sebagai kasubak teknis KPU Kota Padang

“DPT adalah orang yang wajib memberikan suara dalam Pemilu yang yang berusia 17 tahun atau sudah menikah, petugas penata pemilih ditunjuk itu dari masyarakat dari lurah atau RT (PANTRI) Sosialisasi

¹⁷⁵Wawancara dengan M. Scyahbana Syam, Devisi Perencanaan Teknis, Jln Ahmad Dahlan No 5 jam 11, 17 Maret 2013

yang dilakukan oleh KPU ada disetiap tahapan di media masa bahwa proses DPT tidak hanya penyelenggara yang aktif tetapi juga masyarakat media digunakan mobil keliling, Radio, media cetak, media masa dalam bentuk tokso dialog atau dalam bentuk materi yang diberikan itu dilakukan setiap Pemilu sebelum pemutakhiran harus kembali terhadap pemuktahiran”.¹⁷⁶

KPU Kota Padang Melaksanakan sosialisasi untuk menarik partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu sebagaimana yang diungkapkan oleh informan M. Scyabhana Syam, sebagai devisi perencanaan teknis KPU Kota Padang.

Sebelum Pilpres 2009 anggota KPU Kota Padang melakukan sosialisasi. Sosialisasi kami berikan kepada pemilih pemula SMA Bunda Padang dan sosialisasi juga diberikan kepada darma wanita, dan sosialisasi juga dilakukan dengan cara penyebaran bahan-bahan sosialisasi di tempat-tempat umum di Kota Padang.¹⁷⁷

Hal yang lain juga diungkapkan oleh Olnida sebagai kasubak hukum KPU Kota Padang

“Anggota KPU Kota Padang melaksanakan sosialisasi untuk menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu, dengan sosialisasi ini kami berharap supaya masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Sosialisasi yang kami lakukan itu ada berdasarkan karakteristik dari masing-masing daerah, diaman Kota Padang ini terdiri dari 11 Kecamatan, kami menarik partisipasi masyarakat itu seperti kesenian tradisional seperti Salung, Rabab, dan juga makanan tradisional seperti lapek, disana kami menyampaikan pesan-pesan pentingnya Pemilu.”¹⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tingginya angka Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 hanya disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, Faktor politis. Golput politis, yakni mereka yang merasa tidak punya pilihan dari

¹⁷⁶ Wawancara dengan Jafrinal, Kasubak Teknis KPU Kota Padang, Jln Ahmad Dahlan No 5 jam 1017 Maret 2013

¹⁷⁷ Wawancara dengan M. Scyabhana Syam, Devisi Perencanaan Teknis, Jln Ahmad Dahlan No 5 jam 11, 15 Mei 2013

¹⁷⁸ Wawancara dengan Olnida, Kasubak Hukum KPU Kota Padang, Gunung Sarik jam 10. 15 Mei 2013

kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa Pilpres/Pileg/Pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. *Kedua*, faktor sosial ekonomi. faktor sosial ekonomi Lebih memilih bekerja dibanding datang ke TPS, terutama dikalangan pekerja yang memperoleh upah secara harian. *Ketiga*, faktor teknis lebih memilih kegiatan lain dari pada ikut Pemilu. Tingginya Golput di Kota Padang bukan karena lemahnya kinerja penyelenggara Pemilu akan tetapi karena faktor politis sosial ekonomi dan faktor teknis.

Kinerja KPU Kota Padang telah bekerja seefisien mungkin ini terbukti dari data yang didapatkan proses yang dilakukan sudah semaksimal mungkin. Berdasarkan data yang ditemukan DPT Pilpres dibandingkan dengan DPT Pileg sangat jauh sekali perbedaannya DPT Pileg yaitu 548.014 sedangkan DPT Pilpres 571.069. Artinya ada kenaikan penambahan DPT. Berdasarkan hasil penelitian informan ada yang Golput karena tidak ada dapat undangan (C6) undangan itu tidak sarat mutlak DPT akan tetapi saratnya adalah warga negara Indonesia yang berada di Kota Padang sepanjang namanya sudah terdaftar di DPT dia sudah bisa memilih walupun undangan tidak ada, undangan itu gunanya untuk memberitahukan bahwasanya pada hari itu Pemilu.

Ada dua hal kenapa seseorang tersebut tidak dapat undangan, yang pertama ketika petugas datang ke rumah dia tidak ada dirumah dan undangan itu ditahan kalau pemilih tidak ada dirumah undangan itu ditahan oleh petugas. Undangan itu gunanya untuk memberitahukan bahwasanya pada hari itu Pemilu pada hari libur kebanyakan mahasiswa bukan karena faktor C6 itu, kapasitas KPU hanya mensosialisasikan seluruh tahapan. Meakomodir seluruh warganegara.

KTP, Paspor dibolehkan sepanjang terdaftar di DPT waktu yang digunakan untuk Pilpres hanya satu bulan karena penyempurnaan dari DPT Pileg. Untuk pemuktakhiran DPT Pilpres digunakan media dan mobil keliling kelurah-lurah.

Tingginya angka Golput di Kota Padang juga disebabkan oleh faktor teknis. Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.

3. Akibat Tingginya Persentase Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 bagi Demokrasi

Berdasarkan hasil penelitian dampak Golput ini akan berakibat kepada legitimasi, legitimasi akan rendah. Ketidakmampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja, maka fenomena Golput akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*political decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggungjawab.

Tindakan Golput dalam jangka pendek Golput memang sia-sia karena tidak mengubah apapun, namun dalam jangka panjang justru menjadi bagian penting dari pendidikan politik menuju ke tingkat kematangan berpolitik dan berdemokrasi (*maturity*). Golput adalah salah satu instrumen gerakan moral rakyat yang dilakukan dengan cara mengekspresikan ekspresinya dengan tidak berekspresi (*silent movement*)

Hogerwerf menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan para ahli dalam menghubungkan partisipasi politik dengan sistem demokrasi. Morris Jones menyatakan bahwa semakin sedikit partisipasi politik maka semakin baik demokrasi, sikap apatis dianggap sebagai tanda demokrasi yang sehat. Hal ini mengindikasikan adanya toleransi dan kepercayaan pada pemimpin-pemimpin yang dipilih.

Sementara ahli lainnya Morris Rosenberg berpendapat bahwa semakin sedikit partisipasi politik berarti semakin buruk keadaan demokrasi, sikap apatis dianggap sebagai tanda timbulnya rasa kurang percaya terhadap efektifitas partisipasi politik yang diberikan. Demokrasi itu adalah siapa yang terbanyak itu yang menang, kalau yang tidak memilih lebih banyak dari pada yang memilih, maka demokrasi tidak berjalan dengan baik.

Awal Desember 2008 atau menjelang memasuki tahun Pemilu 2009, isu tentang Golput mulai disoroti kembali dengan menambahkan ide tentang fatwa haram. Menurut ketua MUI pusat bidang fatwa, KH. Ma'ruf Amin, MUI tidak mengeluarkan fatwa tanpa pertimbangan. Tetapi dari desakan masyarakat yang meminta *guidelines*, dan resah atas wacana Golput yang berkembang. Mengingat masalah Pemilu sangat krusial, maka putusannya tidak diambil di komisi fatwa tetapi melibatkan 700 ulama seluruh Indonesia dari semua kelompok/golongan, yaitu dalam Ijma' Ulama akan tetapi kenyataannya persentase Golput pada Pilpres 2009 lebih tinggi dari pada Pilpres 2004.

BAB VII

PENUTUP

Bab penutup ini secara ringkas membahas empat uraian. *Pertama*, simpulan yang berisi tentang saripati atau penyederhanaan dari jawaban penelitian, *Kedua*, implikasi merupakan arah tindak lanjut dari makna yang terkandung dalam temuan. *Ketiga*, saran merupakan inti dari implikasi yang menurut peneliti dapat diterapkan oleh pihak yang memerlukan.

E. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian tentang Golongan putih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2009 di Kota Padang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Proses memilih menjadi Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung pertama kali diadakan pada Pemilu 2004. Sebelumnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pilpres 2004 diadakan dua kali putaran. Pada putaran pertama kebanyakan informan ikut memilih pada Pilpres 2004. dan pada putaran kedua ada sebagian informan yang tidak ikut memilih dengan alasan karena kesibukan seperti bekerja, tidak ditempat, dan adanya unsur kejenuhan dari informan karena sebelum Pilpres 2004 juga diadakan Pemilu legislatif dan informan juga beralasan tidak ikut memilih karena partainya tidak masuk pada putaran Pilpres putaran kedua. Pilpres 2009 bentuk-bentuk Golput di Kota Padang yaitu Golput teknis, teknis politis dan Golput politis, Golput yang

paling banyak adalah Golput politis. Pada Pilpres 2014 nanti kebanyakan informan tidak ikut memilih karena Pemilu menurut informan hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan semata tanpa memperdulikan nasib negaranya dan janji-janji kampanye tidak ditepati.

Faktor penyebab tingginya Golput di Kota Padang pada Pilpres 2009 adalah faktor politis, teknis, dan sosial ekonomi. Akibat tingginya Golput bagi demokrasi legitimasi akan berkurang ketidakmampuan partai politik dan pemerintah menampilkan kinerja, maka fenomena Golput akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*political decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi, dimana partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggungjawab.

F. Implikasi

Meningkatkan kesadaran masyarakat sebelum Pemilu (Pre Elections Voter Awereness) adalah aspek pertama sebelum mendorong mereka berpartisipasi dari setiap pentahapan Pemilu. Jelas, aspek ini perlu dikampanyekan terus menerus sehingga partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.

Membangun opini publik bahwa Pemilu yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip jujur dan adil sesuai dengan keinginan masyarakat. Membangun kapasitas individu yang mampu bertindak sebagai pemilih rasional melalui keterlibatan NGO, PT dan sebagainya. Mendorong munculnya kandidat yang

muncul dari komunitas masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari upaya membangun harapan mereka dalam Pemilu.

Mendorong kandidat dan partai politik untuk memenuhi janji kampanye sehingga ada kesan positif terhadap Pemilu yang diikuti masyarakat. Memahami perubahan perilaku masyarakat dalam bersosialisasi dan memanfaatkan agen sosialisasi tersebut sebagai media dalam membangun kesadaran baru tentang pentingnya Pemilu. Misalnya, memanfaatkan media sosial yang digandrungi anak-anak muda, pemanfaat IT dalam pendaftaran dan sebagainya.

G. Saran

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi Golput. *Pertama* faktor eksternal dari individu adalah perbaikan pada sistem kepartaian dalam arti kata, orang memilih itu karena partai artinya partai itu sebagai pilar demokrasi. Fungsi partai diperbaiki dulu, ada 6 fungsi partai dan hanya bisa bekerja hanya satu yang akan dilaksanakan itupun ketika mau Pemilu yaitu rekrutmen politik fungsi yang lain seperti sosialisasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik tidak pernah dijalankan partai. Semua fungsi kepartaian itu semuanya harus jalan.

Kedua dengan cara internal pada individu memang harus ada pendidikan politik dilakukan oleh KPU memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula pemerintah juga harus memberikan sosialisasi bahwa pemilih itu adalah bagian dari tanggung jawab kepada negara bukan kewajiban kepada negara tidak hanya

hak tapi juga kewajiban terhadap negara dan harus datang karena 5 tahun akan menentukan masa depan negara jadi ada pikiran yang baik untuk datang.

DAFTAR RUJUKAN

Dokumen

- Grafik Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
- Perbandingan Data DAK2, DP4, dan DPT Pemilu 2004, 2005, 2008, 2009 dan 2010 Perkecamatan
- Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Provinsi Sumatera Barat
- Resume Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Serta Suara Tidak Sah di KPU Provinsi Sumatera Barat Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Suara tidak Sah tingkat KPU Kabupaten/Kota
- Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan
- Resume Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Serta Suara Tidak sah di KPU Provinsi Sumatera Barat
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat KPU Kabupaten/Kota
- Undang-undang Negara Republik Indonesia No.10. 2008. tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Buku

- Asrinaldi. 2012. *Politik Masyarakat Miskin Kota*. Yogyakarta: Gava Media
- Alfian. 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Andi Faisal Bakti, Ph. Dkk. 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia Press.
- Arbi Sanit. 1999. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.